HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
31 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

ACEH

Green Policing Polda Aceh: Sinergi Pelestarian Lingkungan dan Penguatan Kepedulian Sosial di Dayah Daruzzahidin

Oleh Redaksi · 20 Nov, 23.18 WIB



ACEH BESAR – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh, Brigjen Pol. Latif Usman, memimpin kegiatan penanaman pohon (Green Policing) dan penyaluran bantuan sosial di Dayah Daruzzahidin, Jalan Blang Bintang Lama Km 10, Desa Lamceu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari implementasi Program Quick Wins Kapolri tersebut menjadi wujud kepedulian Polda Aceh terhadap kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Polri, ulama, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat.

Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Pimpinan Dayah Daruzzahidin, Abi Dr. H. Abdur Razak, Lc., M.A., bersama para santri dan masyarakat setempat.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, mengatakan bahwa program Green Policing merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata Polri dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Melalui kegiatan tersebut, Polri mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus membangun kesadaran menjaga alam bagi generasi mendatang.

"Hari ini Bapak Wakapolda Aceh bersama pejabat utama Polda Aceh melaksanakan penanaman pohon di lingkungan Dayah Daruzzahidin.

Selengkapnya di halaman 16 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 16
OPINI 23
Aneka Berita 25

NASIONAL

Sosok Kombes Iman Imanuddin, yang Diduga Gunakan Rumah di Bogor Jadi Posko Makar



BANDA ACEH -- Sosok Kombes Pol Iman Imanuddin kini tengah jadi sorotan publik usai rumah di Bogor digeledah pihak Bareskrim Polri.

Rumah diduga milik perwira tinggi Polri itu diduga menjadi salah satu posko upaya makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Nanggroe Terima Diplomat AS, Bahas Penguatan Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Pembangunan Aceh



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan kehormatan Penasihat Politik (Political Counselor) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, David Muehlke, bersama delegasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Medan.

Selengkapnya di halaman 16 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Jelang Penyaluran Bantuan, Dinas Pangan Aceh Besar Pastikan Kesiapan Beras di Gudang Bulog



ACEH BESAR — Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar bersama Perum Bulog melakukan pengecekan kesiapan beras bantuan pangan untuk masyarakat di Kompleks Pergudangan GSP Bulog Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (20/11/2026).

Selengkapnya di halaman 17 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Nomor Urut 3, Muhammad Saman Bidik



BANDA ACEH – Kontestasi pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031 mulai mengerucut pada pertarungan gagasan pembenahan organisasi. Muhammad Saman, yang memperoleh nomor urut 3, menawarkan agenda penguatan transparansi, profesionalisme, perlindungan wartawan, hingga kesejahteraan anggota sebagai arah perubahan kepemimpinan PWI Aceh.

Selengkapnya di halaman 18 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

32 BERITA

NASIONAL

Sosok Kombes Iman Imanuddin, yang Diduga Gunakan Rumah di Bogor Jadi Posko Makar

Oleh Redaksi · 20 Nov, 21.37 WIB





BANDA ACEH -- Sosok Kombes Pol Iman Imanuddin kini tengah jadi sorotan publik usai rumah di Bogor digeledah pihak Bareskrim Polri.

Rumah diduga milik perwira tinggi Polri itu diduga menjadi salah satu posko upaya makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, siapa sebenarnya Kombes Iman dan seperti apa rekam jejaknya selama ini?

Sebelumnya, penggeledahan rumah diduga posko dari Iman Imanuddin telah dikonfirmasi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro pada Jumat (20/11/2026).

Dalam keterangannya untuk Tirto, Susatyo menyebut bahwa penggeledahan itu telah berlangsung sejak Kamis (19/11).

Rumah itu, kata Susatyo, jadi salah satu dari lima lokasi yang digeledah Bareskrim di Bogor dan Tangerang, Jawa Barat sejak kemarin. Kelima lokasi ini disebut terkait dengan kasus upaya makar yang dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Penggeledahan terkait tindak pidana makar,” jelas Susatyo.

"Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi Posko bagi KBP IM. Kegiatan saat ini masih berlangsung. Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon," ungkapnya.

Kombes Pol Iman Imanuddin selama ini dikenal sebagai salah satu perwira tinggi yang tengah aktif menjabat di tubuh kepolisian. Ia kini tercatat sebagai pejabat di lingkungan Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespim Lemdiklat Polri).

Profil Kombes Iman Imanuddin dan Rekam Jejaknya

Di tubuh kepolisian, Kombes Pol Iman Imanuddin dikenal sebagai salah satu perwira tinggi dengan reputasi yang cukup solid dalam lima tahun terakhir. Rekam jejaknya banyak berada di seputar di bidang reserse dan pernah menjabat sejumlah jabatan strategis.

Iman menjadi polisi setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2002. Sejak itu, alumni SMA Taruna Nusantara ini menghabiskan masa awal dinas kepolisiannya di bidang reserse.

Pada periode awal kariernya, Iman pernah menjabat sejumlah jabatan di kepolisian wilayah Jawa Barat. Ia pernah menjadi Kapolsek Cikampek, Kasatreskrim Polres Tasikmalaya, Kasatreskrim Polres Bogor, hingga Kasatreskrim Polres Karawang.

Pada penghujung dekade 2010-an, kariernya mulai menanjak setelah ditarik oleh Bareskrim Polri sebagai Kanit II Subdit Dittipidsiber. Memasuki dekade 2020-an, ia mulai menjadi kapolres di sejumlah wilayah, termasuk Bogor dan Tangerang Selatan.

Pada 2022 Iman mendapat mutasi ke Polda Metro Jaya. Semula ia diplot sebagai Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya sebelum jadi direktur unit itu …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Bakal Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR, Bambang Pacul Dapet Kode

Oleh Van · 19 Nov, 23.46 WIB

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyerahkan langsung dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI pada Rabu, 25 November 2026.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, setelah rapat perdana panitia terkait pengisian jabatan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

"Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan," kata Bambang.

Ia menyebut waktu penyerahan masih belum ditentukan. Namun, Prabowo diperkirakan datang langsung untuk menyerahkan dua nama tersebut kepada pimpinan MPR.

MPR Siapkan Penyambutan Prabowo

Bambang mengatakan pimpinan MPR akan menyambut kedatangan Prabowo dengan penuh kehormatan. Pimpinan fraksi dan alat kelengkapan MPR juga akan turut hadir dalam agenda tersebut.

"Kami semua akan menerima di ruang delegasi, di ruang rapat, ruang rapat gabungan itu dengan kehormatan penuh. Pakai jas, pakai dasi, kompletlah. Bukan hanya pimpinan MPR, tapi kami akan didampingi oleh pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan MPR. Alat kelengkapan majelis tepatnya," ungkapnya.

Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K Harman, turut menyampaikan informasi mengenai rencana penyerahan tersebut. Ia menyebut Prabowo akan datang langsung ke MPR pada tanggal yang sama.

"Ya tanggal 25 itu ke pimpinan majelis ke panitia Ad Hoc. Tanggal 25 itu Bapak Presiden bakal menyerahkan dua nama itu ke pimpinan majelis," kata Benny.

"Saya mendapatkan informasi begitu, bapak presiden akan datang sendiri tanggal 25. Belum tahu belum tahu (waktunya) ini masih informasi awal," imbuhnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sidang Kuota Haji, Ismail: Saya di Pesakitan Tapi Mereka Masih Bebas

Oleh Redaksi · 20 Nov, 19.17 WIB



BANDA ACEH — Direktur Operasional PT Maktour, Ismail Adham, mempersoalkan statusnya sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Dia merasa diperlakukan tidak adil lantaran harus duduk di kursi pesakitan, sementara pihak-pihak yang menurutnya mengumpulkan dan menikmati aliran uang dalam jumlah besar justru belum terseret sebagai terdakwa.

"Saya juga bertanya, kenapa saya yang hanya duduk di kursi pesakitan, sedangkan ada yang di luar sana yang menikmati semuanya?" kata Ismail saat memberikan keterangan dalam agenda pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Dia secara terbuka, menyinggung pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan maupun pengambilan dana, tetapi hingga kini masih berada di luar tahanan dan tidak duduk sebagai terdakwa.

"Baik itu pengumpulan maupun pengambilan dana yang begitu besar, mereka masih ada di luar dan bisa bernapas dengan lega tanpa duduk di kursi pesakitan," ungkapnya.

Ismail mengaku, tidak memahami dasar keterlibatannya dalam pengaturan kuota haji tambahan dengan skema pembagian 50:50. Bahkan, dia mengklaim baru mengetahui besarnya praktik pengumpulan dan pengambilan uang setelah perkara tersebut dibuka di persidangan.

"Saya baru paham di pengadilan ini ada meeting 4.000, ada orang lain mengambil uang. Saya baru tahu bahwa begitu masifnya Kemenag dan teman-teman yang ada di luar melakukan pengambilan dana yang begitu luar biasa," bebernya.

Mantan pejabat operasional Maktour itu, bersikeras tidak pernah terlibat dalam proses penambahan kuota, pembagian kuota, maupun pengambilan keputusan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

"Sejak awal, saya sama sekali tidak pernah ada keterlibatan soal penambahan kuota, pembagian kuota, maupun keputusan Dirjen," tandasnya.

Dia juga membantah pernah meminta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengumpulkan uang atau menjanjikan sesuatu kepada pihak lain. Ismail turut menyangkal mengikuti rapat daring yang membahas penambahan kuota haji.

"Saya tidak pernah meminta pengumpulan dana. Ikut Zoom meeting terkait penambahan kuota dan lain-lainnya juga tidak pernah," ujarnya.

Menurutnya, praktik pengumpulan dan pengambilan dana dalam perkara tersebut baru diketahuinya ketika persidangan berlangsung.

"Saya baru mengetahui di pengadilan ini begitu masifnya mereka melakukan hal-hal yang saya sendiri tidak pernah berniat dan tidak pernah melakukan itu," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Ismail meminta jaksa penuntut umum (JPU) KPK tidak tebang pilih dalam menangani perkara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan Hari Ini, Komisi III DPR Beri Apresiasi ke Dasco

Oleh Van · 19 Nov, 23.16 WIB

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Pembahasan regulasi tersebut disebut menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam keterangan resminya Kamis, (19/11/2026) mengatakan pengesahan dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB. Ia menyebut proses legislasi RUU tersebut telah melalui perjalanan panjang, termasuk pembahasan intensif di Komisi III sejak September 2025.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penyadapan Prabowo Disebut untuk Kepentingan Pribadi Listyo Sigit, Mahfud MD: Omong Kosong

Oleh Redaksi · 20 Nov, 18.24 WIB





BANDA ACEH - Mahfud MD mempertanyakan motif di balik kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia tidak percaya tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan menilai pengakuan mengenai hal itu tidak masuk akal.Pandangan tersebut disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu saat berbincang dengan Rhenald Kasali dalam kanal YouTube Rhenald Kasali pada 19 November 2026.

Dalam perbincangan tersebut, Rhenald menyinggung pengakuan dalam kasus penyadapan yang menyebut tindakan itu dilakukan untuk keperluan sendiri tanpa melibatkan end user atau pihak pengguna akhir lainnya.

Mahfud meragukan pengakuan tersebut. Menurutnya, sulit diterima jika seorang pemimpin kepolisian melakukan penyadapan terhadap kepala negara tanpa izin hanya untuk kepentingan pribadi.

"Nah, kita secara ilmiah mengatakan klaim bahwa itu hanya untuk Listio itu kita enggak percaya dan itu omong kosong," ujar Mahfud.

Ia kemudian mempertanyakan alasan penyadapan terhadap nomor telepon presiden dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan.

Mahfud menilai, jika tindakan tersebut memang bertujuan membantu atau melindungi presiden, seharusnya ada pemberitahuan dan permintaan izin terlebih dahulu.

"Bagaimana Bapak bisa menjawab seumpama Bapak Kapolri, kenapa kamu nyadap presiden? Untuk apa? Kan pasti mau melawan presiden. Enggak ada jawaban lain. Kalau membantu presiden, lapor aja, 'Pak, saya minta izin ya menyadap Bapak dengan nomor telepon-telepon ini.' Ini enggak minta izin. Kan pasti ingin menjatuhkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengaitkan kasus tersebut dengan dinamika politik dan serangan terhadap pemerintahan Prabowo. Berdasarkan analisis intelijen dan ketahanan pemerintahan yang disampaikannya, ia menduga penyadapan tersebut berkaitan dengan upaya sabotase untuk mendelegitimasi kepemimpinan presiden dan menggerus kepercayaan publik.

Ia menyoroti kondisi sebelum pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026. Menurut Mahfud, saat itu serangan dan gelombang ketidakpercayaan terhadap Prabowo cukup masif di media sosial. Situasi tersebut juga diwarnai sejumlah peristiwa, mulai dari pemadaman listrik hingga aksi demonstrasi.

Namun, Mahfud melihat adanya perubahan setelah kasus penyadapan terungkap dan terjadi pergantian Kapolri. Ia menyebut perhatian publik yang sebelumnya banyak tertuju kepada Prabowo kemudian beralih ke persoalan yang melibatkan mantan Kapolri.

"Sekarang hampir dua bulan ini Pak Presiden jarang sekali diserang, berbelok ke Kapolri semua sejak dia diganti.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Saiful Mujani: Mundurnya Gibran Bukan Skenario Prabowo, Melainkan Tekanan Fakta Hukum

Oleh Redaksi · 20 Nov, 18.34 WIB



BANDA ACEH - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden merupakan akibat akumulasi persoalan hukum dan tekanan masyarakat sipil, bukan skenario yang dirancang Presiden Prabowo Subianto.Saiful mengatakan, polemik dokumen pendidikan Gibran, termasuk perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), menjadi titik awal melemahnya posisi Politik Gibran hingga berujung pada pengunduran diri.

Menurut Saiful, Prabowo sebenarnya menginginkan pemerintahan berjalan stabil hingga akhir masa jabatan pada 2029. Karena itu, ia menilai mundurnya Gibran bukan kehendak Prabowo, melainkan konsekuensi tekanan politik dan hukum yang semakin kuat.

"Kita lihat orang seperti Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun yang bergerak tanpa bayaran, bersatu menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat di DPR," kata Saiful diskusi di kanal YouTube Kanal SA.

Saiful mengapresiasi peran aktivis, akademisi, dan sejumlah tokoh yang konsisten mengawal persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Ia menyebut langkah awal yang digagas Denny Indrayana turut mendorong isu tersebut berkembang menjadi tekanan politik di parlemen.

Menurutnya, partai-partai politik di DPR pada awalnya cenderung berhati-hati. Namun, tekanan publik yang semakin besar membuat sejumlah fraksi mulai bergerak menggalang tanda tangan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP).

Jumlah dukungan yang terkumpul bahkan disebut telah melampaui persyaratan minimal. Situasi tersebut, kata Saiful, membuat posisi Gibran semakin sulit dipertahankan sebelum DPR menggelar sidang paripurna.

Ia membandingkan pengunduran diri Gibran dengan mundurnya Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dalam skandal Watergate. Saiful menilai keputusan mundur menjadi pilihan yang lebih realistis daripada menghadapi proses politik yang berpotensi berujung pada tekanan dan rasa malu.

Di DPR, Saiful menilai PKS menjadi salah satu partai yang paling konsisten menyuarakan persoalan tersebut sejak awal. Sikap itu kemudian diikuti sejumlah politikus PDI Perjuangan, termasuk Deddy Sitorus.

NASIONAL

Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar, Disebut sebagai ‘Buah Tangan Senior ke Junior’

Oleh Van · 19 Nov, 23.35 WIB

JAKARTA — Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengaku menerima uang sebesar USD 75 ribu atau sekitar Rp 1,3 miliar dari staf operasional biro travel Pesona Mozaik, Nur Faudzin alias Nanang.

Pengakuan itu disampaikan saat Gus Alex menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

Dalam persidangan tersebut, Gus Alex menyebut uang itu sebagai bentuk ucapan terima kasih dari senior kepada junior, sementara total pemberian yang dibahas mencapai USD 85 ribu.

Jaksa KPK Greafik Loserte kemudian mengonfirmasi catatan penerimaan uang dari Pesona Mozaik kepada Gus Alex.

"Kami masih ingat mencatat Pesona Mozaik, kan begitu?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Alex.

Cerita Pemberian Uang dari Pesona Mozaik

Gus Alex menjelaskan, uang tersebut diberikan dalam dua tahap. Pemberian pertama berlangsung sekitar Juni 2023, menjelang keberangkatannya ke Arab Saudi untuk menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji.

Saat itu, Nanang bersama Muis Ali Murtadho datang ke rumahnya membawa dua amplop berisi uang USD 45 ribu.

Satu amplop berwarna cokelat berisi uang untuk Gus Alex, sedangkan amplop putih berisi USD 10 ribu yang disebut sebagai titipan untuk Rizky Fisa Abadi.

Ketika mempertanyakan maksud pemberian tersebut, Gus Alex mengaku Muis menyebut uang itu sebagai pemberian dari senior kepada junior.

"'Mas, ini apa?', 'Ini dari senior untuk junior'," kata Alex menirukan percakapannya dengan Muis.

"Terus terang saya terima uangnya," lanjutnya.

Gus Alex mengaku kemudian membawa uang USD 10 ribu ke Kementerian Agama dan menyerahkannya kepada Rizky pada hari yang sama.

Ia mengatakan Rizky menerima amplop tersebut dan mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan ruangannya.

Setelah pelaksanaan ibadah haji 2023 selesai, Nanang kembali datang dan menyerahkan uang USD 40 ribu sehingga total uang yang diterima Gus Alex mencapai USD 75 ribu.

Gus Alex Sebut Uang Telah Dititipkan ke KPK

Dalam persidangan, Gus Alex menyatakan tidak pernah meminta ataupun menuntut uang dari pihak Pesona Mozaik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Bantah Dukung Dasco Buat Jadi Wakil Presiden RI

Oleh Redaksi · 19 Nov, 20.13 WIB

BANDA ACEH -Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah mengerahkan relawannya untuk mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Jokowi menyebut dukungan tersebut merupakan hak Politik masing-masing relawan.

Ayah mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu mengaku tidak memberikan arahan soal siapa yang menempati kursi Wakil Presiden RI setelah ditinggal putranya.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat diwawancarai di kediamannya di Solo, Jawa Tengah Kamis (19/11/2026) seperti dimuat Kompas Tv.

"Ya, itu hak politik dari setiap relawan untuk mendukung siapa pun dan saya tidak pernah mengarahkan untuk mendukung siapa," ujar Jokowi.

Saat kembali ditanya mengenai kemungkinan adanya arahan kepada relawan, Jokowi menegaskan tidak pernah memberikan instruksi tersebut.

"Tidak ada arahan, tidak ada arahan," tegasnya.

Gibranisti Dukung Dasco

Sebelumnya dukungan untuk Dasco menjadi wakil presiden disampaikan relawan pendukung Jokowi dan Gibran sejak hari pertama Gibran menyatakan berhenti, Kamis (12/11/2026) lalu.

Saat itu, anggota Dewan Penasihat Gibranisti, Ade Darmawan, menilai Dasco menjadi sosok yang tepat menggantikan Gibran.

"Yang pertama, beliau (Gibran) menyampaikan dia tidak oposisi dan tetap mendukung pemerintahan Prabowo," kata Ade Darmawan di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026).

Kami mendukung satu nama, Bang Dasco." kata Ade mantap saat melepas Gibran di Istana Wapres.

Namun Ade mengakui dukungan itu bukan arahan dari Jokowi.

“Tidak ada, kalau itu tidak ada arahan, tidak ada sama sekali. Saya rasa itu murni dari teman-teman relawan saja,” kata dia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aktivis 98: Pengesahan UU Perampasan Aset 'Kemenangan Palsu' untuk Rakyat Indonesia

Oleh Redaksi · 20 Nov, 18.03 WIB



BANDA ACEH - Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis (19/11/2026) menuai sorotan kritis. Meski disambut antusias sebagai penantian panjang selama 18 tahun, substansi regulasi tersebut dinilai justru melemahkan upaya perampasan aset koruptor.Pengesahan undang-undang tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa catatan maupun penolakan.

Langkah cepat DPR mengesahkan beleid ini terjadi menyusul desakan publik, termasuk aksi massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung DPR. Aksi tersebut sempat menghasilkan komitmen tertulis dari pimpinan DPR—Sufmi Ahmad Dasco, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal—untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Namun, menurut aktivis 98 Ivan Panusunan menyebut UU Perampasan Aset sebagai kemenangan palsu untuk rakyat, percepatan pengesahan ini dinilai hanya mengejar tenggat waktu politis tanpa menjaga kualitas substansi pasal di dalamnya. Terdapat tiga poin krusial dalam undang-undang tersebut yang disoroti karena dianggap melumpuhkan efektivitas pemberantasan korupsi.

1. Penghapusan Pasal Kekayaan Tidak Wajar (Illicit Enrichment)

Dalam draf versi pemerintah tahun 2023, ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan dari penghasilan sah (illicit enrichment) sempat tercantum, sejalan dengan rekomendasi Pasal 20 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Namun, dalam UU yang baru disahkan, ketentuan ini ditiadakan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengonfirmasi tidak dimasukkannya pasal tersebut dengan alasan menyangkut ranah hukum materiil—bukan hukum acara—serta mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiadaan pasal ini dinilai membuat mekanisme pembuktian terbalik terhadap harta mencurigakan penyelenggara negara tidak dapat berjalan, sehingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kehilangan daya paksa hukum apabila belum ditemukan perkara pidana pokoknya.

2. Perampasan Aset Dihentikan Jika Terdakwa Divonis Bebas

Sorotan kedua tertuju pada Pasal 9 ayat (3) dan (5). Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila seorang buronan tertangkap saat permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture) sedang berlangsung, pemeriksaan aset akan dihentikan untuk mendahulukan proses pidana.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Enam Warga Pemalang Jadi Tentara Bayaran Rusia Terjerat Pinjol dan Judol

Oleh Redaksi · 20 Nov, 18.45 WIB



BANDA ACEH — Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol Yuliyanto mengungkapkan, sebanyak enam warga di Kabupaten Pemalang telah direkrut menjadi tentara bayaran Rusia. Dia mengatakan, mereka yang direkrut menghadapi masalah keuangan, termasuk terlibat judol dan pinjol."Yang sudah direkrut menjadi tentara di Rusia itu warga Pemalang enam orang. Yang enam orang sudah ada di sana," ungkap Yuliyanto ketika diwawancara di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (20/11/2026).

Dia menambahkan, keenamnya merupakan warga Kecamatan Bantarbolang. "Korban ini orang-orang yang bermasalah dengan keuangannya: terlibat pinjol, terlibat judol, seperti itu," ujarnya.

Menurut Yuliyanto, di antara para korban bahkan ada yang pernah menjadi admin judol. "Mereka ada juga yang pernah menjadi admin judol di luar negeri, di Kamboja kalau enggak salah," ucapnya.

Yuliyanto mengungkapkan, belum lama ini Polres Metro Jakarta Barat telah mengungkap keberadaan sebuah rumah di Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jateng, yang diduga menjadi fasilitas pelatihan tentara bayaran untuk dikirim ke Rusia. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka, yakni Iwan Mykhailov asal Ukraina dan Taila Mykhailov.

Yuliyanto mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, selain enam warga Pemalang yang berhasil direkut dan diberangkatkan ke Rusia, ada pula warga atau rekrutan yang digagalkan keberangkatannya. "Jadi dari Polda Metro itu mengungkap korbannya ada 23 orang. Yang 15 orang ini sudah berangkat, yang delapan orang gagal berangkat," ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam proses perekrutan, para tersangka menawarkan pekerjaan dengan gaji ratusan juta rupiah kepada masing-masing korban. "Dia diiming-imingi untuk bekerja menjadi sopir, kemudian menjadi pekerja bangunan, penjaga perbatasan. Kemudian dijanjikan gaji Rp 400 juta sampai Rp 500 juta untuk kontrak satu tahun," ucapnya.

Yuliyanto menambahkan, para tersangka memang tidak langsung menawarkan pekerjaan sebagai tentara bayaran. "Setelah sampai di sana baru kemudian diadakan kontrak," kata dia.

Terkait rumah di Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, yang diungkap Polres Metro Jakarta Barat, Yuliyanto mengonfirmasi bahwa rumah tersebut memang hendak digunakan sebagai fasilitas pelatihan bagi calon tentara bayaran yang bakal dikirim ke Rusia. "Itu memang direncanakan untuk pelatihan sebelum berangkat ke sana. Tapi itu baru disiapkan, belum pernah ada yang latihan di situ," ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sri Radjasa Bongkar Dugaan Peran Listyo Sigit dalam Lengsernya Airlangga, Ini Respon Golkar!

Oleh Redaksi · 19 Nov, 20.06 WIB

BANDA ACEH - Praktisi intelijen Sri Radjasa mengungkap dugaan keterlibatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam proses pergantian kepemimpinan Partai Golkar dari Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia.

Ia mengklaim, Listyo Sigit diduga ikut diperankan dalam komunikasi melalui video call ketika Bahlil memanggil sejumlah Ketua DPD Golkar tingkat I satu per satu untuk meminta dukungan.

Sri Radjasa menyebut informasi tersebut diperolehnya dari sejumlah mantan Ketua DPD Golkar tingkat I. Menurut dia, komunikasi melalui video call itu diduga digunakan untuk memastikan dukungan para pimpinan daerah terhadap upaya menggantikan Airlangga dengan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya ini bicara berdasarkan fakta. Bagaimana Listyo Sigit memainkan perannya seperti separuh dewa pada saat menjatuhkan Airlangga, informasi itu saya dapat dari beberapa orang Ketua DPD Golkar tingkat I pada saat itu," ungkap Sri Radjasa dikutip Kamis (19/11/2026).

Ia kemudian membeberkan kronologi yang menurutnya terjadi setelah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.

Sri Radjasa mengklaim, setelah kemenangan tersebut, Bahlil memanggil para Ketua DPD Golkar satu per satu. Dalam setiap pertemuan, Bahlil disebut melakukan panggilan video dengan Listyo Sigit untuk menunjukkan siapa saja pimpinan daerah yang telah menyatakan dukungan.

"Setelah Prabowo-Gibran menang, dipanggil sama Bahlil Lahadalia. Dipanggil satu-satu, kemudian Bahlil telepon Listyo Sigit melalui video call. 'Halo, Pak Kapolri. Oh iya, yang ini oke, dukung kita untuk jatuhkan Airlangga. Terus dukung saya nanti jadi Ketua Golkar'," kata Sri Radjasa menggambarkan percakapan yang diklaimnya terjadi.

Menurut Sri, setiap Ketua DPD yang dipanggil diperlihatkan kepada Listyo Sigit melalui sambungan video call. Bahlil disebut kemudian meminta konfirmasi mengenai dukungan masing-masing pimpinan daerah.

"Jadi setiap satu orang ditunjukkan, pakai video call. Listyo Sigit di-video call sama Bahlil. Bahlil memanggil Ketua DPD satu per satu, kemudian bertanya, 'Oh ya, duduk. Apa, Pak?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gus Ipul Bantah Uang Rp70 Miliar Mengalir ke NU: Fahd Arafiq Jangan Membual!

Oleh Redaksi · 19 Nov, 17.47 WIB

BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum memPBNU Saifullah Yusuf menyampaikan bantahan terkait adanya aliran uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).Bantahan pria yang biasa disapa Gus Ipul itu merespons pernyataan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd Arafiq yang mengeklaim soal uang Rp70 miliar ke Muktamar NU.

"Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti itu sama dengan fitnah," tegas Ipul saat dihubungi wartawan, pada Kamis, 19 November 2026.

Ipul mempersoalkan pernyataan Fahd lantaran yang bersangkutan bukan pengurus, panitia, serta peserta muktamar.

Dia pun lantas meminta Fahd agar tidak membual dan menyebarkan omong kosong.

"Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU. bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi," ujarnya.

"Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu," …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MPR Siapkan Skenario jika Calon Wapres Pengganti Gibran Mendadak Menolak

Oleh Redaksi · 20 Nov, 12.54 WIB



BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.Salah satu hal yang menjadi pembahasan Panitia Ad Hoc MPR adalah mengantisipasi kemungkinan salah satu dari dua calon Wapres yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto mendadak menyatakan tidak bersedia.

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan mekanisme pemilihan hingga pelantikan Wapres pengganti.

“Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tibatiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluarnya,” kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menyepakati Dua Hal

Ia menjelaskan, rapat perdana Panitia Ad Hoc telah menyepakati dua hal yang akan menjadi hasil akhir pembahasan.

Pertama, rancangan Ketetapan (Tap) MPR RI tentang pengangkatan calon menjadi Wapres RI.

Kedua, rancangan mekanisme pemilihan dan pelantikan Wapres, termasuk hal-hal teknis yang belum diatur secara terperinci dalam ketentuan perundang-undangan.

Ia mencontohkan, Panitia Ad Hoc juga akan membahas bentuk surat suara yang digunakan dalam pemilihan, apakah dengan cara dicoblos, dicontreng, ditandatangani, atau menggunakan cap jempol.

“Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas Panitia Ad Hoc,” ujarnya.

Ditarget Rampung Satu Hari Sebelum Paripurna MPR

Bambang menyebut, pembahasan tersebut ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum rapat paripurna MPR pada 9 Desember 2026.

Dengan demikian, seluruh rancangan dan mekanisme yang diperlukan harus sudah disiapkan pada 8 Desember 2026.

Menurut dia, pembahasan akan dilakukan secara maraton mengingat proses pengisian jabatan Wapres merupakan peristiwa yang langka dan membutuhkan kajian mendalam.

“Ini terus terang karena peristiwa ini adalah peristiwa langka yang perlu juga melakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, mungkin konstitusi,” jelas Bambang.

Sebelumnya, MPR RI membentuk panitia ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan pembentukan panitia ad hoc tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR.

Panitia tersebut akan diisi dua orang wakil ketua dan 36 anggota yang berasal dari fraksi-fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dasco Bocorkan Isi Pertemuannya dengan Menhan Sjafrie, Ini yang Dibahas

Oleh Redaksi · 20 Nov, 19.13 WIB



BANDA ACEH -Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Kamis kemarin, 19 November 2026.

Dasco menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara DPR dan Kementerian Pertahanan menjelang pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurutnya, Sjafrie berkomunikasi dengan dirinya selaku pimpinan DPR yang membawahi Badan Legislasi (Baleg), serta Ketua Komisi I DPR Utut Adianto terkait rencana perubahan kedua undang-undang Pertahanan Nasional.

"Pertemuan dengan Pak Sjafrie, Menteri Pertahanan kemarin itu, karena begini, kebetulan DPR ini kan akan membahas Prolegnas," ungkap Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

"Kemudian Pak Sjafrie mengkomunikasikan dan berkoordinasi, baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab membawahi Badan Legislasi serta Pak Utut Ketua Komisi I tentang rencana dari Kementerian Pertahanan untuk kemudian melakukan revisi tentang Undang-undang Pertahanan maupun kemudian Undang-undang TNI," sambungnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, pertemuan tersebut merupakan komunikasi biasa antara DPR dan Kementerian Pertahanan sebagai mitra kerja.

Menurut Dasco, koordinasi diperlukan ketika pemerintah memiliki rencana mengusulkan perubahan regulasi yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan militer.

"Sehingga kemudian menurut saya itu kan adalah pertemuan biasa, komunikasi yang kemudian memang harus dilakukan antara mitra. Dalam hal ini kami DPR dengan Kementerian Pertahanan selaku mitra," ujarnya.

Dasco juga mengakui memiliki hubungan baik dengan Sjafrie. Hal itu turut membuat pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana koordinasi biasa.

"Dan kemudian juga saya juga kebetulan kan memang kenal baik dengan Pak Sjafrie, sehingga menurut saya pertemuan kemarin itu juga adalah pertemuan yang ya biasa saja, menurut saya, koordinasi biasa," demikian Dasco.

NASIONAL

Yusril: Ada Tokoh yang Pakai Hasil Sadapan Listyo Sigit untuk Gulingkan Presiden

Oleh Redaksi · 19 Nov, 17.05 WIB

BANDA ACEH - Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkap adanya petunjuk keterlibatan pihak lain dalam dugaan kasus makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan hasil penyadapan yang dilakukan oleh pihak internal Polri.Yusril mengatakan, penyidikan yang awalnya berfokus pada kalangan internal Polri kini membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak di luar institusi kepolisian.

"Ya, sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini, namanya pemeriksaan ini, memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri, tapi tidak tutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain, dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan, sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri," kata Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Yusril, penyidik juga berpeluang memeriksa pejabat maupun birokrat pemerintahan lainnya apabila ditemukan keterkaitan dengan tujuan penyadapan tersebut.

"Dan karena itu memang pemeriksa akan terus dilakukan, bahkan mungkin juga dilakukan kepada pejabat ataupun birokrasi pemerintahan yang lain yang terkait dengan tujuan dari penyadapan itu sendiri. Dan itu harus dilakukan," ujarnya.

Yusril menjelaskan, penyidik masih mendalami pihak yang memberikan perintah maupun pihak yang memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.

"Ya, masih dalam tahap pendalaman," kata Yusril ketika ditanya apakah penyidik telah menemukan pihak yang memerintahkan atau menggunakan hasil penyadapan.

Ia kemudian menyinggung keterangan Kapolri dalam rapat kerja bersama DPR beberapa hari sebelumnya. Saat itu, menurut Yusril, Kapolri menyatakan bahwa pengguna akhir atau end-user hasil penyadapan adalah mantan Kapolri Listyo Sigit.

"Sampai beberapa hari yang lalu ketika dia ada kantor kerja dengan DPR, Pak Kapolri menyatakan bahwa sampai saat ini end-usernya adalah mantan Kapolri, Pal Sigit," ungkapnya.

Namun, Yusril menyebut proses penyidikan terus berkembang. Dari pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti terbaru, penyidik menemukan petunjuk yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar dengan tujuan menghalangi presiden menjalankan tugas dan kewajibannya.

"Tapi sampai saat itu, sesudah itu kan ada hasil-hasil pengembangan, hasil dari tahap penyidikan dan pemeriksaan terhadap proses yang baru dan pengumpulan alat bukti, memang ditemukan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud Sebut Budi Arie Berlindung ke Solo, Eks Menkominfo yang Terseret Kasus Judol

Oleh Redaksi · 19 Nov, 20.01 WIB

BANDA ACEH – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyinggung sikap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, yang disebutnya berlindung ke Solo di tengah sorotan terhadap namanya dalam perkara dugaan perlindungan situs judi online (judol) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Mahfud menyatakan, nama Budi Arie telah disebut dalam surat dakwaan perkara judi online tersebut. Ia bahkan mengaku pernah menerima informasi mengenai detail pemeriksaan dan penyerahan dua kardus di sebuah rumah yang menurutnya mengarah pada perkara tersebut.

"Budi Arie kan sudah disebut di dalam dakwaan, di dalam dakwaan sudah disebut keterlibatan Budi Arie. Itu fakta hukum, penyebutan di dalam pengadilan itu," kata Mahfud dalam sebuah wawancara sebagaimana dinukil Monitorindonesia.com, Kamis (19/11/2026).

Mahfud kemudian mengungkapkan informasi yang pernah diterimanya melalui percakapan lanjutan (follow-up chat), mulai dari waktu pemeriksaan, pihak yang menyerahkan, lokasi penyerahan, hingga isi dua kardus tersebut.

"Bahkan dulu ada, saya pernah mendapat follow-up chat-nya tentang pemeriksaan itu tanggal berapa, ke siapa, yang menyerahkan siapa, di rumah siapa, dua kardus dan macam isinya apa. Kan di situ sudah ada waktu itu dan semua mengarah ke situ," ujarnya.

Mahfud juga secara terbuka menyebut Budi Arie berlindung ke Solo. Ia mengaitkan hal tersebut dengan langkah politik Budi Arie setelah keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ekspose Kasus Makar Listyo Sigit Ditunda Pekan Depan, Alasannya Masih Dirahasiakan

Oleh Redaksi · 20 Nov, 13.16 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri memutuskan menunda agenda ekspose kasus dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat Polri lainnya.Ekspose bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) semula dijadwalkan Jumat (20/11/2026) kini diundur hingga pekan depan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penundaan tersebut. Namun, dia belum mengungkap alasan di balik perubahan jadwal maupun tanggal pasti pelaksanaan ekspose.

"Ekspose dengan JPU (jaksa penuntut umum) ditunda minggu depan," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).

Semula, ekspose perkara bersama jaksa penuntut umum (JPU) dijadwalkan berlangsung hari ini atau Jumat (20/11/2026). Agenda tersebut dilakukan setelah penyidik Bareskrim melakukan gelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026).

Bareskrim Periksa 59 Saksi

Sebelum menjadwalkan ekspose bersama Kejagung, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami dugaan makar tersebut.

Susatyo mengungkapkan, sebanyak 59 orang telah dimintai keterangan sejak laporan polisi (LP) diterbitkan pada 11 November 2026. Pemeriksaan dilakukan secara maraton selama sepekan.

"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," ujar Susatyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Dari total saksi yang diperiksa, termasuk empat orang yang telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Penyidik juga meminta keterangan sejumlah pihak lain yang dinilai berpotensi menjadi tersangka dalam perkara dugaan makar.

"Semua saksi sudah kami periksa, baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal juga saksi-saksi lainnya," ujar Susatyo.

"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensi berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," lanjutnya.

Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut yakni:

1. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
2. Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta.
3. Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
4. Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik Telusuri Tiga Tahapan Dugaan Makar

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

UU Perampasan Aset Jangan Galak di Atas Kertas tapi Tumpul di Lapangan

Oleh Redaksi · 20 Nov, 10.45 WIB



BANDA ACEH - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Rapat Paripurna DPR menandai babak baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi di negeri ini.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, Banyak pihak memandang langkah ini sebagai terobosan krusial yang telah lama dinantikan untuk memulihkan kerugian negara secara lebih efektif, bahkan sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, di tengah optimisme terhadap hadirnya payung hukum baru ini, ada satu catatan mendasar yang menurut Benny perlu terus diingatkan bersama.

"Sebaik dan sekomprehensif apa pun materi muatan dalam sebuah undang-undang, efektivitasnya di lapangan pada akhirnya sangat bergantung pada tiga hal: kualitas manusianya, integritas aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat," katanya, lewat akun X, Jumat, 20 November 2026.

Bagi pihak-pihak yang belajar hukum sudah paham tentunya bahwa dalam teori sistem hukum yang dikemukakan pakar hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen yang saling berkaitan yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Benny menyebut, pengesahan UU Perampasan Aset baru menjawab elemen pertama, yakni pembaruan substansi hukum. Tanpa pembenahan serius pada struktur dan budaya hukum, regulasi yang progresif sekalipun berisiko kehilangan daya gigitnya. Pasal-pasal dalam UU ini hanya berhenti sebagai macan kertas.

Dari sisi struktur hukum dan manusia di dalamnya, undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola dan menangani aset-aset hasil rampasan tindak pidana. Badan ini memikul tanggung jawab besar untuk menelusuri, membekukan, hingga menyita harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan.

"Di titik inilah kewaspadaan konstitusional kita harus bekerja," ujarnya.

Kewenangan yang begitu besar di pundak Badan Perampasan Aset menuntut pengawasan ketat agar tidak bergeser menjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Instrumen ini tidak boleh digunakan untuk menyingkirkan lawan Politik, memproteksi kelompok tertentu, mengumpulkan harta bagi segelintir pihak, apalagi merampas secara sewenang-wenang (hostile) harta rakyat yang diraih dengan susah payah.

Penegakan hukum yang berkeadilan harus mampu membedakan secara jernih antara pelaku kejahatan ekonomi—yakni para pengusaha hitam yang merampok kekayaan negara—dengan pengusaha putih yang taat hukum, setia membayar pajak, serta turut menopang perekonomian bangsa di saat negara menghadapi masa sulit.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Keluarga Jokowi Tak Lagi Dilindungi Listyo, Mahfud MD: Perkara Hukum Bisa Dibuka

Oleh Redaksi · 19 Nov, 17.23 WIB

BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai tumbangnya Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi laporan-laporan hukum yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk kembali bergulir. Menurutnya, selama Listyo berkuasa, perkara-perkara tertentu sulit disentuh. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Rizal mengaitkan pembahasan ini dengan penyadapan yang disebut dilakukan di bawah Listyo saat ia masih menjabat Kapolri. Ia bertanya apakah persoalan hukum yang dulu muncul terhadap Jokowi bisa berkembang lagi setelah Listyo, yang selama ini dianggap kekuatan Jokowi, tumbang.

Mahfud menjawab bahwa kemungkinan itu sangat terbuka. “Itu sangat mungkin dimunculkan karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi,” kata Mahfud.

Ia menyebut laporan Ubedilah Badrun sebagai contoh. “Bukti-bukti itu sudah diuraikan lewat berbagai media, berbagai podcast. Mestinya itu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Mahfud menilai hambatan selama ini berkaitan dengan posisi Listyo di kepolisian.

“Kalau dulu mungkin agak susah karena masih ada Listyo. Apa pun, ada Listyo, enggak bisa,” kata Mahfud.

Menurut dia, situasi kini berbalik. “Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Listyo kini bahkan kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri.

“Listyo itu dulu kan menyelamatkan orang lain semua. Sekarang enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri,” lanjut Mahfud.

Mahfud juga menyebut pihak yang selama ini melindungi sudah tidak ada. Ia memakai istilah “bohir Politik” untuk menggambarkan sosok yang dulu dianggap menahan perkara tertentu.

Ia berharap pergantian ini membuat aparat kembali menjalankan hukum secara setara. “Listyo sudah tidak ada sekarang, supaya polisi-polisi yang di bawah kembali berkiblat ke pusat, yang hukum tegakkan kepada siapa pun,” katanya.

NASIONAL

Jokowi Mengaku Bisa Lebih Lincah Usai Ditinggal Kabinet Prabowo

Oleh Redaksi · 19 Nov, 20.18 WIB

BANDA ACEH -Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lebih lincah usai tidak ada di dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Jokowi setelah pengunduran diri sejumlah petinggi PSI mulai dari Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, hingga Isyana Bagoes Oka yang keluar dari partai tersebut.

Diketahui ketiganya saat ini merupakan anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun saat ini ketiganya sudah memutuskan keluar dari PSI.

Menurut Jokowi, dengan tidak adanya anggota PSI di Kabinet Merah Putih, maka …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Nama Dasco Menguat Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sjafrie Ungkap Isi Pertemuan

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.07 WIB

BANDA ACEH - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada isu terkait calon wakil presiden atau cawapres yang dibahas saat bertemu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (19/11/2026) siang ini.

Hal ini dikonfirmasi usai Sjafrie bertemu Dasco secara tertutup. Diketahui, nama Dasco menguat dalam bursa cawapres.

“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” kata Sjafrie.

Sjafrie menegaskan, pertemuannya dengan Dasco hanya membahas terkait tugas-tugasnya menyangkut urusan di bidang yang dia emban.

“Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Heboh Dana Rp70 Miliar Guyur NU, Gus Lilur Singgung Nama Nusron

Oleh Redaksi · 20 Nov, 09.44 WIB



GELORA.CO - Pengakuan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang mengklaim menggelontorkan dana Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) terus berbuntut panjang. Klaim tersebut kini membuka babak baru polemik dugaan praktik Politik uang di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.Tokoh NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, angkat bicara menyoroti dugaan transaksi uang yang berkaitan dengan upaya memengaruhi suara dalam kontestasi Muktamar. Ia menyebut sejumlah nama yang diduga berkaitan dengan pusaran dana tersebut, mulai dari Fahd, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Gus Lilur menduga dana dari Fahd diserahkan melalui Arif Sugiyanto untuk kemudian diteruskan kepada Nusron. Meski demikian, ia tidak memastikan secara mutlak kebenaran aliran dana tersebut.

“Mungkin Fahd memberikan uang kepada Arif untuk disampaikan ke Nusron. Saya enggak tahu,” ujar Gus Lilur saat dihubungi Inilah.com, Kamis (19/11/2026).

Dugaan Pengondisian Suara hingga Laporan ke KPK

Menurut Gus Lilur, hal utama yang mesti ditelusuri penegak hukum bukanlah sekadar pengakuan pemberian uang Rp70 miliar, melainkan tujuan dan peruntukan dana tersebut. Ia menduga terdapat transaksi yang mengarah pada upaya membeli suara atau mengondisikan dukungan kandidat dalam pemilihan di Muktamar NU.

Ia menegaskan, transaksi yang diduga berkaitan dengan kepentingan kandidat tertentu tidak boleh serta-merta dianggap sebagai pembiayaan kegiatan resmi organisasi.

Dugaan praktik jual beli suara atau riswah dalam Muktamar NU sebelumnya sudah dilaporkan Gus Lilur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Oktober 2026. Kala itu, ia menyerahkan informasi mengenai dugaan pola transaksi serta aliran dana pengondisian suara. Gus Lilur juga mengungkapkan adanya sejumlah pengurus cabang NU yang berniat mengembalikan uang terkait praktik tersebut agar dapat disita oleh penyidik KPK.

Bermula dari Pengakuan Fahd di Gedung Merah Putih

Bola panas ini menggelinding kencang setelah Fahd menyampaikan pengakuan mengejutkan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/11/2026). Fahd mengklaim KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka karena uang yang dipersoalkan disebutnya murni diperuntukkan bagi kepentingan NU.

Sebelumnya, Fahd mengaku dimintai uang Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto pada Agustus 2026. Meski sempat menolak, Fahd menyebut akhirnya memberikan Rp70 miliar yang diklaimnya sebagai dana talangan atau pinjaman …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Lukas Luwarso: Nasib Jokowi dan Gibran Kini Disebut di Bawah Pengampunan Prabowo

Oleh Redaksi · 20 Nov, 22.52 WIB



Gambar sarkas ini memperlihatkan Joko Widodo yang sedang berlutut dan memegang tangan Presiden Prabowo Subianto yang duduk di kursi emas yang megah. Keduanya mengenakan

BANDA ACEH - Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso, menilai situasi Politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berada dalam posisi sulit.

Menurut Lukas, nasib politik ayah dan anak tersebut saat ini sangat bergantung pada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, ia menggambarkan posisi Jokowi dan Gibran berada di bawah pengampunan Prabowo.

"Jadi sekarang itu justru kebalikannya nasib Jokowi dan Gibran itu under the mercy. Betul-betul di bawah pengampunan Prabowo sekarang," ujar Lukas dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (20/11).

Ia juga menilai ruang bagi Jokowi dan Gibran untuk melakukan perlawanan semakin terbatas. Lukas menyebut, apabila keduanya berani melakukan gerakan yang bersifat melawan, terlebih jika sampai mengarah pada makar, konsekuensinya bisa sangat serius.

"Kalau mereka berani melakukan gerakan-gerakan sifatnya yang mau melawan, apalagi sampai makar itu ya sudah langsung habis segera lah kan sudah enggak punya kekuatan lagi," jelasnya.

Lukas turut menyinggung posisi kelompok yang ia sebut sebagai Parcok dan Parjo. Menurutnya, kelompok tersebut tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, baik secara fisik maupun melalui wacana.

"Parcok sudah hilang kan polisi Parcok sudah mengabdi ke Prabowo. Parjo apalagi. Jadi ya kalau mau melakukan perlawanan yang sifatnya fisik ya sudah enggak mungkinlah. Kalau mau melakukan perlawanan yang sifatnya wacana he ya enggak bisa. Enggak punya modal," tandasnya.

NASIONAL

Tifa Tolak Kesaksian Dua Pegawai KPU di Sidang Ijazah Jokowi, Ungkit Sidik Jari dan Debat dengan JPU

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.30 WIB



BANDA ACEH –- Suasana persidangan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali diwarnai ketegangan.

Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa secara tegas menolak keterangan dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dua saksi tersebut adalah pejabat Sekretariat Jenderal KPU RI Andi Bagus Makkawaru dan mantan anggota KPU DKI Jakarta Binsar S.T. Siagian.

Keduanya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Namun, Tifa justru mempertanyakan kapasitas kedua saksi tersebut. Ia menilai keterangan yang disampaikan tidak didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman langsung terkait persoalan yang dipermasalahkan.

"Karena kedua saksi ini bukan saksi fakta dan apa yang disampaikan tadi tidak tahu dan tidak betul-betul menyaksikan," ujar Tifa dalam persidangan.

"Sehingga saya menolak keterangan kedua saksi," tegasnya.

Keberatan tersebut disampaikan Tifa secara langsung di hadapan majelis hakim.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Islah Bahrawi: Tujuan Penyadapan untuk Menumbangkan Prabowo agar Gibran Jadi Presiden

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.56 WIB

BANDA ACEH - Pengamat intelijen dan terorisme Islah Bahrawi melontarkan dugaan serius terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, penyadapan tersebut patut dilihat bukan hanya sebagai persoalan keamanan negara, melainkan juga kemungkinan bagian dari skenario Politik untuk menggoyang pemerintahan Prabowo dan membuka jalan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden.Islah menduga, ada desain politik yang telah disiapkan sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, skenario tersebut berkaitan dengan pernyataan seorang tokoh yang disebutnya berinisial LSP kepada sejumlah perwira tinggi kepolisian.

” Ternyata ini tujuan penyadapan Presiden Prabowo. Tujuan dari penyadapan ini ingin menumbangkan Prabowo supaya wakilnya menjadi presiden. Silakan simpulkan sendiri siapa yang bermain,” kata Islah dalam podcast yang beredar di media sosial, Kamis (19/11/2026).

Ia kemudian mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan Prabowo hanya bertahan selama dua tahun sebenarnya sudah beredar sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Islah, LSP pernah menyampaikan kepada beberapa perwira tinggi di lingkungan Polri bahwa masa pemerintahan Prabowo tidak akan berlangsung lama. Batas waktunya, menurut pernyataan yang dikutip Islah, hanya sekitar dua tahun.

“Bahkan LSP pernah bilang juga kepada beberapa perwira tinggi bahwa orang-orang yang ada di sekitaran Prabowo ini nanti orang-orang kita,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut, menurut Islah, menjadi penting jika dikaitkan dengan perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Ia menduga terdapat upaya membangun pengaruh di sekitar lingkaran kekuasaan Presiden sejak awal pemerintahan. Salah satu hal yang disorotnya adalah persoalan pengajuan personel kepolisian untuk menjadi ajudan Presiden.

Islah menyebut ada seorang perwira tinggi Polri yang pernah diajukan sebagai ajudan Presiden, tetapi tidak mendapatkan persetujuan Prabowo. Perwira tersebut, menurut Islah, belakangan disebut sebagai salah satu tersangka dalam perkara yang sedang menjadi sorotan.

“Presiden hanya ingin ajudan saya ini orang-orang yang saya pilih. Dari satu polisi menjadi ajudan itu akhirnya memang tidak ada yang dipakai,” ujarnya.

Bagi Islah, rangkaian peristiwa tersebut memunculkan dugaan adanya desain untuk menempatkan orang-orang tertentu di sekitar Presiden.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ratusan Bangkai Tikus Dilempar ke Rumah Dinas Wabup Indramayu, Syaefudin Didesak Mundur

Oleh Redaksi · 20 Nov, 10.52 WIB



BANDA ACEH - Ratusan warga Indramayu melempari rumah dinas Wakil Bupati Syaefudin dengan bangkai tikus. Aksi itu dilakukan untuk mendesak Syaefudin mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan senilai Rp18 miliar.

Aksi yang digelar kelompok Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) di depan rumah dinas wakil bupati pada Kamis (19/11/2026) itu diikuti sekitar 300 orang. Massa membawa ratusan bangkai tikus sebagai simbol kemarahan terhadap dugaan korupsi yang menyeret Syaefudin.

Koordinator aksi RIB, Wendi, menilai Syaefudin seharusnya memiliki kesadaran untuk melepaskan jabatannya. Dia juga meminta wakil bupati itu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indramayu.

"Kami mendesak Syaefudin sebagai tersangka korupsi Rp18 miliar tunjangan perumahan untuk segera mundur dari jabatan wabup. Harusnya dia punya rasa malu dan meminta maaf kepada rakyat," kata Wendi.

Wendi turut menyinggung upaya praperadilan yang sebelumnya diajukan Syaefudin untuk menggugat penetapan tersangkanya. Namun, gugatan tersebut ditolak pengadilan.

Menurut RIB, kasus ini semakin menyakiti masyarakat karena nilai dugaan korupsinya mencapai Rp18 miliar, sementara sebagian warga masih menghadapi kesulitan ekonomi.

Tak hanya mendesak pengunduran diri, massa juga meminta Bupati Indramayu Lucky Hakim menghentikan pembayaran gaji dan tunjangan Syaefudin selama menjalani penahanan.

Mereka turut menuntut penghentian biaya operasional rumah dinas serta pencopotan istri Syaefudin dari sejumlah jabatan organisasi daerah.

Menanggapi tuntutan itu, Lucky mengatakan pemberhentian sementara wakil bupati baru dapat dilakukan setelah status hukumnya meningkat menjadi terdakwa.

"Proses pemberhentian jabatan wakil bupati akan dilakukan saat statusnya menjadi terdakwa. Nanti bila sudah terdakwa, Kemendagri akan memberhentikan sementara. Di saat itu pula semua fasilitas juga akan dihentikan sesuai peraturan yang berlaku," kata Lucky saat dihubungi melalui telepon.

Lucky meminta masyarakat tidak mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Dia menegaskan Syaefudin saat ini masih berstatus tersangka, belum terdakwa.

Adapun tuntutan penghentian gaji dan tunjangan serta pencopotan istri Syaefudin dari jabatan organisasi, kata Lucky, harus mengikuti ketentuan masing-masing.

Menurut dia, posisi istri Syaefudin sebagai anggota DPR merupakan kewenangan partai Politik. Sementara jabatan dalam organisasi daerah akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Lucky pun meminta masyarakat tetap menjaga situasi Indramayu kondusif dan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan

NASIONAL

Mahfud MD Kangen Eks Kapolri, Ingin Lihat Wajah Listyo Sigit saat Diborgol di Sidang Etik

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.38 WIB

BANDA ACEH -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan sindiran tajam kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud mengaku masyarakat sudah merindukan kemunculan Listyo di hadapan publik.

Bahkan, Mahfud secara terang-terangan menyampaikan keinginannya melihat mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu tampil ketika menjalani sidang etik, termasuk saat digiring dalam kondisi tangan diborgol.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary yang diunggah melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17/11/2026).

Dengan nada menyindir, Mahfud mengusulkan agar Mabes Polri tidak menutup-nutupi proses pemeriksaan etik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Sebenarnya sih, kalau boleh usul nih saya kepada Mabes Polri, ini rakyat sudah kangen ngelihat Pak Listyo ini," kata Mahfud.

Ia bahkan ingin wajah Listyo diperlihatkan kepada masyarakat ketika menjalani proses pemeriksaan di komisi etik.

"Jadi kalau saat diadili nanti di komisi etik besok atau besok lusa itu, saya usul ditampilkanlah wajahnya. Kita sudah kangen untuk bilang, hai," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Mahfud melontarkan sindiran yang lebih tajam.

"Saya ingin lihat wajah dia ketika dia diborgol, lalu berjalan menuju peradilan etik itu," tutur Mahfud.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai usulan dan sindiran mengenai keterbukaan serta kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum. Bukan berarti Listyo telah ditahan atau dipastikan akan diborgol dalam proses etik.

Mahfud Usul Listyo Diberhentikan Lebih Dahulu

Sebelum menyampaikan sindiran tersebut, Mahfud lebih dahulu berbicara mengenai perlunya tindakan etik terhadap Listyo.

Menurutnya, pemberhentian dari institusi kepolisian sebaiknya dilakukan lebih dahulu sebelum proses pidana berjalan.

Mahfud menilai, selama status keanggotaan dan jabatannya masih melekat, seseorang masih berhak mendapatkan fasilitas yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai jenderal.

"Memang kita usul semua itu dipecat dulu, pidananya nanti. Sekarang dia kan masih jenderal, masih punya hak rumah, punya hak dikawal," kata Mahfud.

Dalam perbincangan tersebut, Rizal Mustary juga menyoroti persoalan kesetaraan perlakuan terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum.

Ia membandingkan perlakuan terhadap pejabat tinggi kepolisian dengan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Kehilangan Modal untuk Melawan, Parcok Disebut Sudah Mengabdi ke Prabowo

Oleh Redaksi · 20 Nov, 22.55 WIB



Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi alias Mulyono, yang mengenakan kemeja putih, duduk di ujung meja hitam panjang untuk memimpin diskusi dengan sekelompok polisi

BANDA ACEH - Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso, menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kini kehilangan ruang untuk melawan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Lukas, Jokowi dan putranya, mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini berada dalam posisi yang sangat bergantung pada Prabowo. Bahkan, ia menggambarkan nasib Politik keduanya berada di bawah pengampunan Prabowo.

Lukas menilai, jika Jokowi dan Gibran berani melakukan gerakan yang bersifat melawan, terlebih jika sampai mengarah pada makar, konsekuensinya bisa sangat serius.

"Jadi sekarang itu justru kebalikannya nasib Jokowi dan Gibran itu under the mercy. Betul-betul di bawah pengampunan Prabowo sekarang," ujar Lukas dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (20/11).

"Kalau mereka berani melakukan gerakan-gerakan sifatnya yang mau melawan, apalagi sampai makar itu ya sudah langsung habis segera lah kan sudah enggak punya kekuatan lagi," jelasnya.

Lukas turut menyinggung posisi kelompok yang ia sebut sebagai Parcok dan Parjo. Menurutnya, kelompok tersebut tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, baik secara fisik maupun melalui wacana.

"Parcok sudah hilang kan polisi Parcok sudah mengabdi ke Prabowo. Parjo apalagi. Jadi ya kalau mau melakukan perlawanan yang sifatnya fisik ya sudah enggak mungkinlah. Kalau mau melakukan perlawanan yang sifatnya wacana he ya enggak bisa. Enggak punya modal," tandasnya.

NASIONAL

Lima Rumah terkait Brigjen TK dan Kombes IM Digeledah, Jadi Posko Makar?

Oleh Redaksi · 20 Nov, 19.09 WIB



BANDA ACEH -Sejumlah rumah diduga berkaitan Brigjen TK dan Kombes IM digeledah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penggeledahan dilakukan terhadap lima rumah yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat.

“Sejak Kamis malam tim penyidik terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di 5 lokasi rumah terkait Brigjen TK dan Kombes Pol IM di daerah Bogor,” ucap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Jumat, 20 November 2026.

Bukan hanya yang berada di Bogor, penyidik juga menggeledah satu lokasi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Sayangnya, Susatyo tidak menjelaskan kepemilikan rumah di Kabupaten Tangerang itu.

“Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Kombes Pol IM,” ucap dia.

Perlu diketahui, kasus dugaan makar berbeda dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Sejauh ini, Polri belum menetapkan tersangka di kasus dugaan makar.

NASIONAL

Mantan Pimpinan KPK: Raffi Ahmad harus Segera Ditangkap di Kasus Endorse KKP Rp 15 M

Oleh Redaksi · 20 Nov, 09.24 WIB



BANDA ACEH - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta KPK segera mengusut pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad. Dia menyebut pengadaan senilai Rp14,69 miliar itu bukan sekadar polemik endorsement, tetapi sudah mengarah pada dugaan tindak pidana, terutama terkait konflik kepentingan.

Saut menilai persoalan ini tidak bisa dianggap selesai hanya karena uang atau nilai kontrak dikembalikan. Jika dalam proses pengadaan ditemukan konflik kepentingan, dugaan pelanggaran pidananya tetap harus ditelusuri.

"Iya, ini bukan peristiwa cancel culture. Ini peristiwa pidana. Peristiwa pidana sudah terjadi," kata Saut dalam tayangan video yang dilihat Monitorindonesia.com, Jumat (20/11/2026).

Dia menyoroti posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Menurut Saut, jabatan tersebut semestinya membuat Raffi memahami batasan antara tugas publik dan kepentingan bisnis, terlebih ketika perusahaan yang dikaitkan dengannya mendapat pekerjaan dari kementerian.

"Kalau dia mengerti tugasnya sebagai utusan khusus presiden untuk kemudian pembinaan generasi muda, kan dia harus paham. Apalagi itu sampai Rp15 miliar," ujarnya.

Saut juga mempertanyakan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pekerjaan tersebut. Dia menilai proses pengadaan dan potensi benturan kepentingan harus menjadi perhatian serius.

Pengembalian uang, menurut dia, tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang mungkin muncul dari proses pengadaan.

"Kalau uang itu dikembalikan, itu bukan kemudian selesai begitu saja. Karena peristiwa pidananya sudah terjadi, ada konflik kepentingan di sana," jelas Saut.

Dia pun meminta KPK tidak berlama-lama menunggu untuk menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Laporan dan temuan organisasi antikorupsi tersebut, menurut Saut, sudah semestinya menjadi bahan bagi KPK untuk melakukan penelusuran.

"KPK jangan menunggu-nunggu lagi. KPK itu sudah harusnya menerima laporan. Laporan ICW itu kan laporan masyarakat. Jadi jangan menunggu-nunggu lagi untuk kemudian memprosesnya," tegasnya.

Saut mengaitkan desakannya itu dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta aparat mengejar pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan.

"Supaya kemudian kita membantu presidennya. Kan presiden sudah bilang nih kejar sampai ke Antartika, ini ngejarnya ke mana nih," ucapnya.

Saat ditanya apakah temuan ICW cukup menjadi dasar bagi KPK untuk mulai bergerak, Saut mengiyakan. Dia menilai ICW memiliki kapasitas dalam melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

"Oh iya, ICW itu kan lebih profesional," katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Total 59 Orang Diperiksa di Kasus Makar Prabowo, Termasuk Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.19 WIB

BANDA ACEH - Bareskrim Polri telah memeriksa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengumpulan keterangan terhadap 59 saksi yang telah diperiksa penyidik.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, empat dari 59 saksi tersebut merupakan perwira tinggi Polri yang telah menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.

"Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya," ujar Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, keempat tersangka penyadapan itu juga telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan makar. Penyidik turut memeriksa sejumlah pihak lain yang dinilai memiliki informasi terkait perkara tersebut.

Empat perwira tinggi itu adalah Listyo Sigit, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Dalam penyidikan kasus dugaan makar, polisi juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk posko yang diduga menjadi tempat perencanaan. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti lain.

Susatyo mengatakan, penyidik masih mendalami unsur pidana makar karena pembuktiannya tidak sederhana. Ada tiga hal yang menjadi perhatian, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan perbuatan.

"Kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," jelasnya.

Bareskrim juga melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam gelar perkara kasus dugaan makar yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis ini.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sedangkan Slamet tidak ditahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Khozinudin Yakin Kasus Penyadapan Prabowo Tak Berhenti di Listyo Sigit cs: Ujungnya ke Solo

Oleh Redaksi · 20 Nov, 09.12 WIB



BANDA ACEH - Praktisi hukum Ahmad Khozinudin meyakini pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak akan berhenti pada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Dia menduga ada otoritas Politik yang lebih tinggi di balik perkara tersebut.

Khozinudin bahkan meyakini penelusuran kasus yang berkaitan dengan dugaan makar itu pada akhirnya akan mengarah ke Solo.

"Karena dalam praktik hukum, termasuk juga proses politik, agak sulit untuk memahamkan logika publik bahwa persoalan ini berhenti di Listyo Sigit Prabowo. Sementara pasalnya adalah pasal makar, yang berkaitan dengan kekuasaan," kata Khozinudin dalam program Interupsi bertajuk "'End User' Penyadapan: LSP atau Ada Dalang?" di iNews, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, dugaan makar berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Karena itu, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya entitas politik yang berada di balik perkara tersebut.

Dia juga menilai penetapan Listyo sebagai pengguna akhir atau end user informasi hasil penyadapan belum tentu menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Keterangan saksi maupun tersangka lain, kata dia, masih dapat membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Sehingga bisa saja nanti ada keterangan dari pihak-pihak lainnya yang ternyata mengarahkan pada keadaan atau pada kondisi bahwa end user-nya itu bukan Listyo. Saya meyakini ya, kasus ini tidak mungkin berhenti di Listyo," ujarnya.

Ahmad kemudian mengibaratkan pengusutan kasus tersebut seperti aliran sungai yang terus bergerak hingga mencapai muara.

"Ibarat ini aliran gunung air, itu kan ada lagu alir mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Kalau kasus ini dari Jakarta, saya meyakini ujungnya pasti ke Solo," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menilai apabila Listyo disebut sebagai pengguna akhir informasi hasil penyadapan, penyidik juga perlu mendalami kemungkinan adanya otoritas yang lebih tinggi di balik aktivitas tersebut.

"Iya. Dalam konteks ini berarti otoritasnya lebih tinggi daripada Listyo. Dia pasti otoritas kekuasaan. Karena apa? Otoritas penegakan hukum itu di bawah otoritas kekuasaan," katanya.

Dia juga mengkhawatirkan adanya upaya untuk membatasi pengusutan perkara agar hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi juga kemungkinan keterlibatan otoritas politik.

"Dan kami khawatir, ini sedang terjadi persekongkolan untuk mengondisikan bahwa kasus ini hanya berhenti pada pihak tertentu dan tidak pada pihak yang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sjafrie Sjamsoeddin Sambangi Gedung DPR Temui Dasco, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 19 Nov, 15.59 WIB

BANDA ACEH -Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, menyambangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang, 19 November 2026.

Pantauan RMOL di lokasi, Sjafrie tiba di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, sekitar pukul 13.55 WIB.

Sjafrie tiba mengenakan baju safari berwarna cokelat, dan langsung menuju lift untuk menuju ruang pimpinan DPR.

Tak ada pernyataan yang disampaikan oleh Sjafrie terkait kedatangannya di Gedung DPR.

Namun, berdasarkan info yang beredar, Sjafrie datang ke Gedung DPR untuk menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Lantai 4, Gedung Nusantara III.

Hingga berita ini diturunkan, Sjafrie dikabarkan masih menggelar pertemuan tertutup dengan Dasco di ruangannya.

Belum diketahui pasti dalam rangka apa dan membahas apa pertemuan antara Sjafrie dan Dasco tersebut.

NASIONAL

Tragedi Porprov Jabar 2026! Atlet Selam Bekasi Meninggal saat Beraksi

Oleh Redaksi · 20 Nov, 09.19 WIB



BANDA ACEH - - Atlet selam Kabupaten Bekasi, Muhammad Ryan Najwan Muttaqin, meninggal dunia saat mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 di Perairan Pantai Tirtamaya, Kabupaten Indramayu, Kamis (19/11/2026). Ryan mengembuskan napas terakhir setelah mengalami insiden ketika berlomba di nomor selam 3.000 meter.

Atlet berusia 20 tahun tersebut sebenarnya mengawali perlombaan dengan penampilan menjanjikan. Ryan bahkan sempat memimpin persaingan sebelum insiden terjadi saat memasuki putaran ketiga.

Berdasarkan kronologi awal, Ryan diduga mengalami benturan dengan atlet lain ketika melakukan putaran balik menuju titik awal perlombaan. Benturan yang diduga terjadi di bagian kepala itu membuat Ryan kehilangan kesadaran dan tidak mampu melanjutkan pertandingan.

Tim penyelamat yang berada di lokasi langsung bergerak melakukan evakuasi. Ryan dibawa menuju tepi pantai dalam kondisi tidak sadarkan diri untuk mendapatkan pertolongan medis.

Upaya penyelamatan kemudian dilakukan di pinggir pantai. Petugas memberikan tindakan resusitasi jantung paru (RJP) sebagai langkah pertolongan untuk memulihkan kondisi Ryan.

Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Karena tidak menunjukkan respons, Ryan segera dilarikan ke RSUD Indramayu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sayangnya, nyawa atlet muda Kabupaten Bekasi itu tidak berhasil diselamatkan. Ryan kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani upaya penanganan medis.

Kepergian Ryan di tengah perjuangannya membela Kabupaten Bekasi menjadi perhatian dunia olahraga nasional. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman turut menyampaikan belasungkawa atas tragedi yang terjadi dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ketum KONI Pusat Soroti Keselamatan Atlet Porprov Jabar

Marciano Norman menyayangkan insiden yang merenggut nyawa Ryan. Dia menilai sangat memprihatinkan ketika seorang atlet meninggal dunia saat sedang berjuang mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga.

"Selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya M. Ryan Najwan Muttaqin. Sangat disayangkan karena adanya atlet yang meninggal dunia di tengah perjuangannya mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga," kata Marciano Norman dikutip dari Gerakita, Jumat (20/11/2026).

Marciano juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Porprov Jawa Barat 2026. Menurut dia, aspek keselamatan atlet harus menjadi perhatian utama dalam setiap pertandingan olahraga.

“Tentunya ini menjadi evaluasi bagi KONI Jawa Barat dan juga anggotanya. KONI Jawa Barat merupakan Provinsi ideal, terbukti tiga kali berturut menjadi juara umum PON.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD, Persoalkan Transparansi RUU Perampasan Aset

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.24 WIB

BANDA ACEH - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Peneliti ICW Ibrahim mengatakan, pengaduan tersebut dilayangkan lantaran koalisi menilai DPR tidak transparan dalam menyampaikan dokumen rancangan undang-undang kepada masyarakat. Ia menilai, proses pengesahan RUU Perampasan Aset memperlihatkan adanya persoalan dalam tata cara pembentukan undang-undang di parlemen.

"Hari ini adalah bukti bahwasanya DPR mengabaikan aturan hukum yang mengatur dirinya sendiri terkait bagaimana rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat," kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, pengaduan kepada MKD merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya telah dilayangkan kepada DPR. Somasi tersebut dinilai telah jatuh tempo pada 16 November 2026, sehingga pihaknya memutuskan meneruskan persoalan itu melalui mekanisme etik di DPR.

"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," tegasnya.

Menurut Ibrahim, kewajiban menyebarluaskan rancangan undang-undang telah diatur dalam ketentuan hukum. Namun, hingga RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang, pihaknya mengaku belum menemukan dokumen tersebut dipublikasikan melalui situs resmi DPR.

Ibrahim memastikan, pengaduan yang disampaikan koalisi telah diterima oleh sekretariat MKD dan memperoleh nomor laporan. Pihaknya berharap lembaga etik DPR tersebut segera memproses aduan sekaligus menjatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran terbukti.

Lebih lanjut, dia mempertanyakan bahwa DPR, khususnya Komisi III, telah melibatkan masyarakat secara terbuka dalam pembahasan regulasi tersebut. Menurutnya, banyaknya kelompok masyarakat yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak otomatis menunjukkan partisipasi publik yang bermakna.

"Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Oleh Redaksi · 20 Nov, 19.01 WIB



BANDA ACEH -Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengakui partainya ikut terlena selama 10 tahun dalam Politik pencitraan. Ia bahkan menyebut dirinya turut menjadi bagian dari praktik pencitraan palsu yang membuat kader PKB kehilangan fokus pada kerja nyata untuk rakyat.

Pengakuan itu disampaikan sosok yang akrab disapa Cak Imin itu saat menjelaskan tujuan Majelis Ilmu Sosialisme Islam yang digelar PKB. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum pertobatan sekaligus upaya membangunkan kader partai yang selama ini terbuai dalam pencitraan.

"Sudah berapa tahun pingsan? Kira-kira 10 tahun pingsan, disibukkan oleh pencitraan-pencitraan palsu, ya termasuk saya. Makanya diskusi publik tentang sosialisme Islam adalah pertobatan PKB," ujar Cak Imin di markas PKB, Jumat, 20 November 2026.

Ia mengatakan, Majelis Ilmu setidaknya diharapkan menghasilkan tiga hal. Pertama, membangunkan kader PKB dari tidur nyenyak agar tidak lagi bersantai-santai. Kedua, membuat kader siuman setelah terlalu lama pingsan.

Dan terakhir, Cak Imin yang juga jabat Menko Pemberdayaan Masyarakat itu mengajak seluruh kader untuk kembali bergerak menghasilkan produk kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di sektor kesehatan.

"Ayo bangun, ayo berbuat, ayo produk dibikin agar kita bisa mengatasi coverage dari seluruh kebutuhan masyarakat kita, terutama kesehatan," tegasnya.

Ia mengakui PKB masih belum maksimal memanfaatkan kesempatan politik untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat.

"Banyak kesempatan yang tidak kita gunakan untuk menghasilkan kebijakan, undang-undang, langkah-langkah bersama rakyat untuk mempercepat kesejahteraan dan kemakmurannya," tandas Cak Imin.

NASIONAL

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan

Oleh Redaksi · 20 Nov, 09.28 WIB



BANDA ACEH - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menaikkan kasus dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial RWM (21) yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede ke tahap penyidikan. Dugaan tindak kekerasan seksual itu disebut terjadi di rumah dinas bupati.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menggelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026) sore.

"Gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada sore ini, sekitar pukul 16.00 Wita, meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan," ujar Henry dalam konferensi pers di Mapolda NTT.

Kasus tersebut ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.

Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah dinas Bupati Kupang untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Henry menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan. Dia juga meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berjalan.

"Secara murni penegakan hukum dilakukan profesional, transparan, dan akuntabel dengan menjunjung praduga tidak bersalah," ucapnya

NASIONAL

KPK Soroti Hilangnya Pasal Harta Tidak Wajar dalam UU Perampasan Aset yang Disahkan DPR

Oleh Redaksi · 20 Nov, 10.47 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hilangnya ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan tidak wajar dalam undang-undang (UU) Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR.

Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam draf RUU Perampasan Aset tahun 2023. Namun, dalam draf terbaru yang akhirnya disahkan menjadi UU, ketentuan mengenai harta tidak wajar tersebut tidak lagi ditemukan.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, perbedaan rumusan tersebut merupakan bagian dari pembahasan antara DPR dan pemerintah. Meski begitu, KPK menegaskan akan mempelajari seluruh ketentuan dalam UU tersebut, terutama pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

"Ya tentunya itu sebuah diskursus, ya, dalam pembahasan suatu ketentuan peraturan perundangan dan tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini," kata Budi kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.

Menurut Budi, pemerintah tetap harus membuka ruang bagi kritik dan masukan masyarakat terhadap regulasi yang telah disahkan tersebut.

"Namun tentunya pemerintah juga pasti terbuka untuk setiap saran, masukan dari seluruh unsur masyarakat karena ini bagian dari proses kebijakan," ujarnya.

Budi menjelaskan, efektivitas UU Perampasan Aset baru dapat dinilai setelah diterapkan. Apabila pelaksanaannya tidak menghasilkan tujuan sebagaimana semangat awal pembentukan UU, evaluasi terhadap regulasi tersebut perlu dilakukan.

"Nah, ketika diimplementasikan ini nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa, apakah output-outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan UU Perampasan Aset ini. Sehingga bisa dilakukan evaluasi kembali. Ya ini kan proses yang berulang, ya, dalam sebuah siklus kebijakan publik," jelasnya.

Terkait tidak terlihatnya peran KPK secara langsung dalam UU tersebut, Budi mengatakan lembaga antirasuah akan terlebih dahulu mengkaji setiap pasal yang memiliki irisan dengan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.

"KPK tentu nanti akan mempelajari dan menganalisis, ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," tegas Budi.

Ia menambahkan, pemulihan aset atau asset recovery selama ini sudah menjadi bagian penting dari penanganan perkara KPK. Penyidik bahkan kerap melakukan penyitaan aset sejak tahap penyidikan untuk kemudian digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Buka-bukaan! Begini Pandangan Jokowi Jika Dasco Jadi Wakil Presiden

Oleh Redaksi · 20 Nov, 18.15 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai munculnya dukungan sejumlah kelompok relawan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah mengarahkan relawan untuk mendukung figur tertentu dalam bursa calon wakil presiden. Menurutnya, pilihan Politik tersebut sepenuhnya menjadi hak masing-masing relawan.

“Itu hak politik dari setiap relawan untuk mendukung siapa pun dan saya tidak pernah mengarahkan untuk mendukung siapa,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dikutip Jumat (20/11/2026).

Saat kembali ditanya mengenai kemungkinan adanya instruksi khusus untuk mendukung Dasco, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan jawaban singkat.

“Tidak ada arahan,” katanya.

Jokowi juga menegaskan bahwa penentuan sosok pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk jika kandidat yang dipilih berasal dari Partai Gerindra.

Ia mengakui sejumlah nama dari Gerindra mulai bermunculan dalam pembicaraan politik mengenai calon RI-2. Salah satu figur yang ikut disebut adalah Dasco yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI.

“Kalau nama-nama dari Gerindra yang muncul, ada beberapa nama yang muncul termasuk Pak Dasco sendiri, itu merupakan hak Presiden nanti untuk menentukan siapa yang diajukan ke DPR,” tutur mantan wali kota Solo itu.

Pernyataan Jokowi tersebut sekaligus menegaskan bahwa dukungan relawan terhadap Dasco tidak bisa dianggap sebagai arahan politik darinya. Keputusan mengenai kandidat yang akan diajukan untuk mengisi posisi wakil presiden tetap berada di tangan Prabowo.

NASIONAL

Korupsi Suap Imigrasi, KPK Didesak Tersangkakan Menteri “RAMA”

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.14 WIB

BANDA ACEH - — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didesak mengusut aliran uang setoran mingguan sebesar Rp40 juta kepada sosok berkode "RAMA".

Sosok misterius itu, muncul dalam surat dakwaan perkara dugaan pemerasan warga negara asing (WNA) dan gratifikasi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI), Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, meminta KPK tidak berhenti pada pihak-pihak yang diduga mengumpulkan dan menyalurkan uang.

Sosok yang disebut sebagai penerima aliran dana juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat di level pimpinan kementerian.

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap pihak yang diduga menerima uang dimungkinkan sepanjang penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sah dan cukup.

"Apabila dalam proses penyidikan dan persidangan ditemukan minimal dua alat bukti yang sah dan cukup yang menunjukkan seseorang benar-benar menerima, mengetahui, atau turut serta dalam penerimaan uang hasil tindak pidana korupsi, maka secara hukum orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," kata Pitra kepada Monitorindonesia.com Kamis (19/11/2026).

Namun, Pitra mengingatkan penyidik harus membedakan antara nama yang sekadar disebut dalam dakwaan, pihak yang dialokasikan uang, dan orang yang benar-benar menerima serta menikmati uang tersebut.

"Ketiganya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda," ujarnya.

Ia meminta, KPK harus mengusut tuntas dugaan perintah pemberian uang kepada sosok berkode RAMA, termasuk memastikan apakah setoran Rp40 juta setiap pekan benar-benar diserahkan dan siapa pihak yang menerima.

Penyidik juga diminta menelusuri bukti transaksi, komunikasi, keterangan saksi, serta pengetahuan penerima mengenai asal-usul uang yang diduga berasal dari pungutan tidak resmi.

"Jangan sampai seseorang yang diduga menerima aliran dana justru tidak tersentuh hukum hanya karena memiliki jabatan tinggi," tandasnya.

Meski demikian, Pitra menekankan penetapan tersangka tidak boleh didasarkan pada tekanan opini publik, melainkan harus bertumpu pada kecukupan alat bukti.

Desakan tersebut mencuat setelah JPU KPK mengungkap mekanisme pengumpulan uang tidak resmi dari layanan pengurusan dokumen keimigrasian dalam surat dakwaan perkara yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan bahwa sekitar Oktober-November 2024, setelah Silmy dilantik sebagai Wamen Imipas, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra memanggil Tessar …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Oleh Redaksi · 20 Nov, 08.55 WIB



BANDA ACEH -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti lamanya ST Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung.

Tercatat sudah tujuh tahun Burhanuddin menjadi salah satu pejabat penting yang paling lama bertahan.

“Salah satu pejabat penting yang terlama. Saya kira kejaksaan Pak. Jaksa Agung. Iya. Sudah tujuh tahun Pak,” kata Mahfud

seperti dikutip dari kanal YouTube Terus Terang, Jumat 20 November 2026.

seperti dikutip dari kanal YouTube Terus Terang, Jumat 20 November 2026.

Mahfud bahkan menduga, lamanya jabatan itu berkaitan dengan banyaknya titipan yang melekat pada institusi tersebut.

“Mungkin dia banyak titipan. Yang kalau ini diganti ini banyak yang merotol nih,” kata Mahfud.

Mahfud menyebut, kekuatan yang selama ini menjadi beking bagi sejumlah persoalan hukum kini sudah mulai runtuh.

Karena itu, menurutnya, inilah momentum bagi Kejagung untuk bergerak dan menertibkan penegakan hukum tanpa lagi bermain-main dengan titipan.

NASIONAL

Dokter Tifa Klaim KPU Tak Pernah Periksa Ijazah Jokowi saat Pencalonan

Oleh Redaksi · 20 Nov, 09.07 WIB



BANDA ACEH - Terdakwa kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti keterangan saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026).

Dia mengeklaim, saksi dari KPU maupun KPU Provinsi DKI Jakarta mengungkap bahwa lembaga penyelenggara pemilu tersebut tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi saat proses pencalonan.

"Lalu yang kedua adalah saksi yang seperti Pak Roy Suryo juga orang pegawai dari KPU ya, KPU Jakarta maupun KPU Pusat ya. Tapi ada hal-hal yang betul-betul sangat menarik ya yang bisa kita lihat bahwa KPU ya sama sekali tadi bersaksi tidak pernah melihat ijazah asli dari saudara Joko Widodo," ujar Dokter Tifa di PN Jakarta Timur seusai sidang.

Dia menyoroti keterangan dua saksi, yakni pegawai KPU Andi Bagus Patawaru dan pegawai KPU Jakarta Binsar Siagian.

Menurut Dokter Tifa, Andi Bagus menjelaskan KPU bertugas melakukan verifikasi dan mengompilasi data pemilu maupun pilkada di seluruh Indonesia. Dengan demikian, dokumen pencalonan dari tingkat wali kota, gubernur, hingga presiden berada dalam penanganan KPU.

Dokter Tifa kemudian mempertanyakan proses verifikasi ijazah Jokowi dalam sejumlah kontestasi Politik mulai dari Pilwalkot Surakarta 2005 dan 2010, Pilgub DKI Jakarta 2012, hingga Pilpres 2014 dan 2019.

Dia juga menyinggung aturan internal KPU dan regulasi kementerian yang menurutnya mewajibkan verifikasi apabila ditemukan kejanggalan pada legalisasi ijazah.

Dokter Tifa turut mengutip sampel hasil penelitian Bonatua Silalahi yang disebut dibawa ke persidangan. Dia menyoroti dua spesimen legalisasi ijazah, termasuk pencantuman nama Dekan Muhammad Naim pada dokumen pencalonan wali kota pada 2005 dan 2010.

Menurut Dokter Tifa, masa jabatan Muhammad Naim sebagai dekan baru berlangsung pada 2008-2012.

"Tapi anehnya legalisir ijazah yang ada tanda tangan Prof. Muhammad Naim juga digunakan untuk Walikota 2005 dan tahun 2010. Padahal Prof. Naim itu baru jadi dekan tahun 2008 sampai 2012. Berarti Prof. Naim ini ketika tanda tangan pakai mesin waktu ya, jadi lompat ya, gitu," tuturnya.

Dia juga mempersoalkan penggunaan spesimen legalisasi yang sama untuk pencalonan Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2014, meski menurutnya posisi dekan telah berganti.

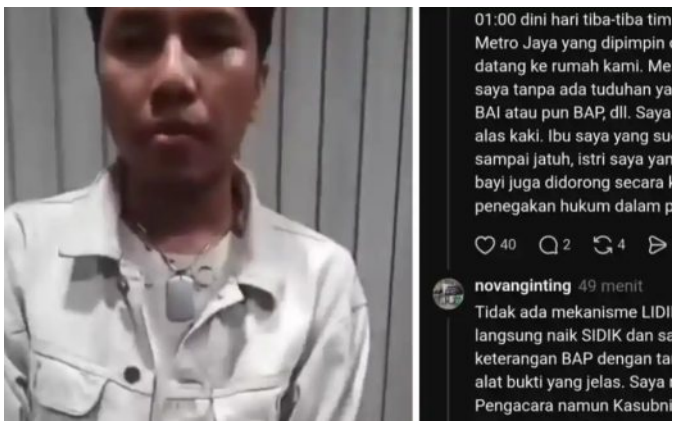
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Usai Unggah Soal Dasco, Seorang Pria Mengaku Dihajar Polisi

Oleh Redaksi · 20 Nov, 14.57 WIB



BANDA ACEH-Seorang pria bernama Cakra Adi Negara mengaku dianiaya oleh Polda Metro Jaya usai mengunggah postingan sensitif soal keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Cakra mengunggah berkas rekam jejak Dasco saat masih menjadi Komisaris di MNC Digital Entertainment 2022.

Saat itu kata Cakra, Dasco memuat pengalaman di sebuah perusahaan kasino di Kamboja Golden Oasis Entertainment.

Belum sampai sehari usai unggahan tersebut, rumah Cakra disebut didatangi pria yang mengaku Polisi pada Jumat (20/11/2026) dini hari.

Istri Cakra, Intan S Dewanti Negara menyebut rumahnya tiba-tiba digeruduk tujuh orang pria yang mengaku dari Tim Siber Polda Metro Jaya pukul 01.00 dini hari.

Para pria yang mengaku Polisi itu pun kata Intan melakukan penganiayaan terhadap suami dan keluarganya.

Bahkan suaminya diseret seperti hewan oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai Polisi.

Pun Intan yang tengah menggendong bayi dan mertuanya didorong oleh Polisi hingga jatuh.

"Mereka tidak bisa menunjukan surat panggilan resmi," tulis Intan.

Saat ini suami Intan, Cakra masih berada di Polda Metro Jaya. Intan pun khawatir dengan suaminya karena penangkapan tidak sesuai prosedur yang dilakukan Polisi.

"Tolong teman teman semua, bantu sebar luaskan. Suami saya tidak melakukan kejahatan apapun. Bantu keadilannya!!" tulis Intan.

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto tidak membantah atau pun membenarkan penangkapan tersebut.

Budi hanya memohon waktu untuk merilis peristiwa tersebut.

"Mohon waktu ya," kata Budi

NASIONAL

Budiman Sudjatmiko hingga Sherly Tjoanda Masuk Simulasi Cawapres

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.03 WIB

BANDA ACEH -Mayoritas masyarakat menginginkan proses penjaringan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2029 dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan kader partai koalisi hingga tokoh di luar partai Politik. Mekanisme ini dinilai dapat membuka peluang bagi figur alternatif, termasuk Budiman Sudjatmiko, melalui konvensi masyarakat sipil.

Temuan survei Logitera Research & Data Consulting menunjukkan, sebanyak 54,9 persen responden memilih mekanisme penjaringan terbuka. Hasil ini mencerminkan keinginan masyarakat agar penentuan cawapres tidak hanya menjadi urusan elite partai politik.

Dalam simulasi terbuka cawapres, Budiman Sudjatmiko memperoleh 6,1 persen. Angka tersebut berada di bawah Dedi Mulyadi sebesar 12,4 persen, Gibran Rakabuming Raka 10,8 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 7,5 persen. Sementara Sherly Tjoanda dan Mahfud MD masing-masing memperoleh 4 persen.

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menilai penjaringan terbuka dapat memberi ruang bagi tokoh di luar partai politik untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Salah satu alternatifnya adalah konvensi yang digelar kelompok masyarakat sipil untuk menghimpun aspirasi publik mengenai figur pemimpin nasional.

"Dengan banyaknya kepemimpinan, maka konvensi bisa membuka ruang memori elit dan publik untuk masuk panggung, seperti Budiman, Sherly Tjoanda, dan lain-lain," kata Yohan di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Menurut Yohan, konvensi masyarakat sipil dapat menjadi tradisi baru dalam penjaringan pemimpin di luar mekanisme partai politik.

"Misalkan gabungan masyarakat sipil membuat konvensi menampung aspirasi orang yang bisa menjadi alternatif di dunia politik, membangun tradisi baru di luar partai," kata Yohan.

Dukungan terhadap penjaringan terbuka sejalan dengan penolakan terhadap pembagian posisi cawapres berdasarkan jatah partai koalisi. Sebanyak 52,1 persen responden menilai mekanisme tersebut tidak wajar dan posisi cawapres sebaiknya ditentukan berdasarkan kemampuan.

Adapun 32,5 persen responden menganggap pembagian jabatan tersebut wajar sebagai bagian dari kerja sama politik, sedangkan 15,3 persen lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Dalam menentukan figur cawapres, integritas juga menjadi pertimbangan utama. Sebanyak 51,9 persen responden menginginkan calon yang memiliki rekam jejak bersih dari korupsi, sementara 36,2 persen lebih mengutamakan pengalaman di pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Satgas Operasi Zebra Seulawah Edukasi Pengemudi Angkutan Umum agar Tertib Berlalu Lintas

Oleh Redaksi · 19 Nov, 23.16 WIB

BANDA ACEH — Satgas Preventif Operasi Zebra Seulawah 2026 memberikan edukasi kepada para pengemudi angkutan umum agar senantiasa tertib dan mematuhi aturan berlalu lintas. Kegiatan tersebut berlangsung di Terminal Penumpang Lhong Bata, Kamis (19/11/2026).

Edukasi ini dilakukan untuk mengingatkan para pengemudi agar tidak berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Petugas mengingatkan para pengemudi untuk mengutamakan keselamatan dan menghindari perilaku berkendara yang dapat memicu kecelakaan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kegiatan edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dalam Operasi Zebra Seulawah 2026 …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud: Jangan Istimewakan LSP, Borgol Tangannya dan Pakaikan Rompi!

Oleh Redaksi · 20 Nov, 07.54 WIB



BANDA ACEH - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tengah menghadapi sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto agar diperlakukan sama seperti tersangka lainnya saat menghadapi proses hukum.

Demikian penegasan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Terus Terang, Jumat 20 November 2026.

"Saya kira rakyat kangen kepada Pak Listyo yang sangat baik hati," kata Mahfud.

"Saya ingin lihat wajah dia ketika dia diborgol, lalu berjalan menuju peradilan etik. Saya kira rakyat kangen pada Pak Listyo yang dulu setiap pagi tengah malam pun muncul, monggo senyum di depan publik kayak dulu," sambungnya.

Menurut Mahfud, soal itu bukan semata soal kerinduan publik, melainkan soal fairness.

Orang lain yang diperiksa diborgol dan memakai rompi, maka perlakuan yang sama seharusnya berlaku untuk semua, tanpa pandang jabatan.

"Ini kritik Bapak ke polisi ya? Saya tidak ngritik, usul, karena yang lalu-lalu juga begitu," pungkas Mahfud.

Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 3 November 2026 terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha.

Ia juga langsung ditahan dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada 4 November 2026.

NASIONAL

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Oleh Redaksi · 20 Nov, 09.02 WIB



BANDA ACEH -Kemunculan relawan Jokowi yang merupakan buronan kasus tindak pidana fitnah, Silfester Matutina, dalam peresmian restoran milik anaknya yang diberi nama "Neng Geulis" di Bandung memancing perhatian publik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun buka suara atas kemunculan Silfester.

Pasalnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 yang diputus pada 20 Mei 2019, Silfester Matutina dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atas tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Loh selama ini ke mana? Kejaksaan gitu ya," ujar Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Terus Terang, Jumat 20 November 2026.

Mahfud mengaku sudah menanyakan langsung ke internal Kejaksaan mengapa Silfester tidak kunjung ditangkap. Jawaban yang ia dapat justru mengarah ke atas.

"Nah kalau saya sih Mas politis nih ya. Punya dugaan. Itu kan gini saya tanya ke dalam. Itu kenapa kok tidak ditangkap itu ke direktorat lah. Tanya ke atas Pak. Artinya itu kunci di atas," kata Mahfud.

Dari situlah, Mahfud membangun dugaan adanya titipan politik di balik mandeknya eksekusi tersebut. Ia menduga, perkara Silfester dititipkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin sejak awal pengangkatannya.

"Oh kalau begitu mungkin ya ketika Pak Jaksa Agung ini mungkin ya kan mungkin boleh ketika Agung itu Pak Burhanudin diangkat jadi jaksa agung mungkin ini dititipkan tolonglah ini kan perkara kecil kan memang perkara khusus gitu ya," kata Mahfud.

"Bilang siap gitu kan iya lalu diangkat jadi jaksa agung sehingga meskipun dia tahu enggak pernah mengeluarkan instruksi apa pun hal yang sekecil ini tapi akibatnya besar bagi penegakan hukum," sambungnya.

Menurut Mahfud, perkara Silfester memang secara bobot pidana terbilang kecil. Namun dampaknya bagi penegakan hukum sangat besar. Sebab satu orang yang tidak dieksekusi bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap seluruh sistem hukum.

"Nah oleh sebab itu kalau sekarang mau tertib masa enggak bisa. Nah oleh sebab itu Kejaksaan Agung masa dia melihat seperti ini dunia sudah mau berubah jangan main-main gitu. Gelombang sedang bergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik," kata Mahfud.

NASIONAL

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Oleh Redaksi · 20 Nov, 08.51 WIB



BANDA ACEH -Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak berminat bergabung dalam pemerintahan. Ia mengaku memilih tetap berada di luar pemerintahan meskipun mendapat tawaran untuk masuk ke dalam kabinet.

Hal ini disampaikan Megawati dalam orasi ilmiah berjudul 'Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia' pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, dikutip Kamis, 19 November 2026.

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati.

Megawati mengatakan, sikap Politik tersebut berlandaskan keyakinan yang bersumber dari Pancasila. Menurutnya, falsafah bangsa harus dipahami melalui sejarah kelahirannya sekaligus penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," kata Megawati.

Sebelum menegaskan sikapnya di luar pemerintahan, Presiden kelima RI itu terlebih dahulu melontarkan kritik terhadap aparat penegak hukum dan kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Megawati menilai masyarakat saat ini cenderung takut menyampaikan pendapat dan selalu menunggu arahan atau komando.

"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," kata Megawati.

Ia mempertanyakan keberanian masyarakat dalam menyampaikan suara, padahal hak tersebut dijamin konstitusi.

"Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," kata Megawati.

Wisuda STIPAN tersebut meluluskan 150 orang, terdiri dari 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara, Ermaya Suradinata; Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto; Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; serta sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, dan pimpinan DPRD dari berbagai daerah.

LINGKUNGAN

39.687 Hektare Tutupan Hutan Aceh Hilang pada 2025, Bencana Ekologis Terus Berulang

Oleh Redaksi · 19 Nov, 21.38 WIB

BANDA ACEH - Kerusakan hutan Aceh menjadi sorotan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana dalam catatan satu tahun bencana ekologis.

Sepanjang 2025, Aceh disebut kehilangan tutupan hutan seluas 39.687 hektare atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Koordinator Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Muhammad Riski, mengatakan kerusakan hutan tersebut menjadi salah satu persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama di tengah bencana ekologis yang terus berulang di sejumlah wilayah Aceh.

Dalam pernyataan sikap bertajuk *"Catatan Satu Tahun Bencana"* yang disampaikan di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026), Riski menyebutkan bahwa sebelum bencana melanda, sebanyak 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh telah berada dalam kondisi kritis.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah oleh kehilangan tutupan hutan dalam skala besar.

Ia menilai kerusakan kawasan hulu dan daerah aliran sungai tidak dapat dipisahkan dari persoalan kebijakan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.

"Semua ini bukan semata kehendak alam. Ini buah kebijakan yang mengobral izin eksploitatif tanpa menghitung daya dukung lingkungan," kata Riski.

Ia juga mengkritik pola penanganan bencana yang dinilai lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan hilir, sementara kerusakan hutan dan kawasan hulu belum mendapatkan penanganan menyeluruh.

"Namun yang dilakukan negara hanyalah membangun bronjong di hilir, sementara hulu yang rusak terus dibiarkan. Itu bukan pemulihan, itu tambal sulam atas kegagalan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola negara," ujarnya.

Riski menilai, pemulihan pascabencana seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur darurat, tetapi juga menyasar akar persoalan kerusakan lingkungan.

Tanpa pemulihan kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah hulu, ancaman bencana ekologis dinilai akan terus membayangi masyarakat Aceh.

Ia mengingatkan, dampak bencana tidak hanya terlihat dari kerusakan infrastruktur dan permukiman, tetapi juga dari hilangnya rasa aman serta terganggunya sumber penghidupan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Riski turut menyinggung bencana yang kembali terjadi sepanjang November 2026.

Sedikitnya 13 kejadian tercatat di Aceh, mulai dari rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol dan merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, hingga ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

DPMG Aceh Barat Perkuat Pengendalian Gratifikasi dan Integritas Aparatur

Oleh Biro Meulaboh · 19 Nov, 20.24 WIB

MEULABOH– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat menggelar sosialisasi dan optimalisasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk memperkuat komitmen aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Kegiatan berlangsung di Aula DPMG Kabupaten Aceh Barat, Kamis (19/11/26), dan dibuka langsung Kepala DPMG Aceh Barat, Drs. Marjan Hanafie L, M.Si.

Dalam sambutannya, Marjan menegaskan pentingnya komitmen seluruh aparatur untuk membangun budaya kerja berintegritas serta menolak segala bentuk pemberian maupun penerimaan gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Inspektur Pembantu Khusus, Irwandi, S.E., CGCAE, mengenai optimalisasi peran UPG sebagai instrumen pencegahan korupsi di …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

TEKNOLOGI

Gibran Rakabuming Raka Sibuk Main Game GTA VI Usai Mengundurkan Diri, Ini Kata Jokowi

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.44 WIB

BANDA ACEH -Gibran Rakabuming Raka Kamis (19/11/2026) resmi bermain game lagi setelah memutuskan mundur dari kursi Wakil Presiden RI.

Pria yang belum genap berusia 40 tahun itu rencananya akan bermain GTA VI yang rilis hari ini.

Sebelumnya kepastian Gibran akan bermain game online lagi diketahui usai sebuah akun parodi Kementerian Kegelapan mengajak Gibran main bareng (Mabar) GTA VI yang akan rilis sepekan dari pengunduran diri Gibran.

Akun tersebut mengajak Gibran Mabar di kolom komentar video pengunduran diri Gibran.

Ajakan tersebut kemudian disanggupi oleh Gibran.

"Sampai bertemu di server GTA Online, Mas" tulis akun Kementerian Kegelapan.

"Gas," balas Gibran.

Akun itu memastikan 19 November 2026 akan Mabar GTA VI bersama Gibran secara perdana.

Sebagai informasi Rockstar Games resmi merilis Grand Theft Auto VI (GTA 6) pada Kamis (19/11/2026).

Di Indonesia, game ini sudah bisa dimainkan di PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X/S mulai pukul 00.00 WIB, 01.00 WITA, atau 02.00 WIT.

Peluncuran ini mengakhiri penantian sekitar 13 tahun sejak Grand Theft Auto V (GTA 5) debut pada 17 September 2013.

Sejak debut pada 2013, GTA 5 hadir di beberapa generasi konsol.

Sementara itu ayah kandung Gibran, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu kegiatan Gibran usai mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden RI.

Bahkan Jokowi mengaku tidak tahu anaknya itu pulang ke Solo atau tidak.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ammar Zoni Terancam Lumpuh di Nusakambangan, Keluarga Khawatir Kondisi Fisiknya

Oleh Redaksi · 20 Nov, 09.15 WIB



BANDA ACEH - Aktor Ammar Zoni dikabarkan terancam mengalami kelumpuhan akibat kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang dinilai tidak memadai dengan postur tubuhnya. Kondisi ini membuat keluarga khawatir terhadap kesehatan dan masa depan mantan suami Irish Bella tersebut.

Informasi itu disampaikan kuasa hukum keluarga Ammar Zoni, Jon Matias. Dia mengaku mendapatkan kabar mengenai kondisi Ammar saat menghadiri pengajian yang digelar keluarga di kawasan Depok pada 8 November lalu.

Jon mengatakan, Ammar memiliki postur tubuh besar dengan tinggi hampir 190 sentimeter. Sementara itu, ruang tahanan berstatus high risk yang ditempatinya memiliki ukuran terbatas.

"Ammar ini kan tinggi badannya, harus dipahami juga badannya gede, kemudian tingginya hampir 2 meter, kalau enggak salah tingginya hampir 190 lebih itu. Nah, sedangkan ruangan di tahanan high risk itu kan cuma 2 kali 4 (meter)," kata Jon Matias dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat (20/11/2026).

Kondisi ruang tahanan dan tempat tidur yang terbatas membuat Ammar kesulitan beristirahat dengan posisi kaki lurus. Dia disebut harus tidur dengan kaki tertekuk karena keterbatasan ruang.

Jon menyebut keluhan tersebut sudah dirasakan Ammar sejak awal dipindahkan ke Nusakambangan. Kondisi itu pun dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan fisiknya jika terus berlangsung.

"Jadi dia tidak bisa kakinya dalam tidur itu lurus, tertekuklah. Itu keluhan sudah sebulan mulai masuk NK (Nusakambangan) tuh sudah ada. Menurut informasinya dari keluarganya, kalau lama-lama situasi itu terjadi, diindikasikan bisa lumpuh," ujar Jon.

Kabar tersebut membuat keluarga Ammar Zoni merasa sedih dan khawatir. Adik-adiknya, Aditya Zoni dan Panji Zoni, disebut turut mencemaskan kondisi sang aktor yang masih memiliki anak-anak kecil.

Keluarga berharap kondisi Ammar mendapat perhatian agar tidak berdampak lebih serius terhadap kesehatannya. Mereka khawatir jika keluhan tersebut terus berlanjut, Ammar berpotensi mengalami gangguan fisik yang dapat memengaruhi kehidupannya ke depan.

"Keluarga kan pasti sedih dan merasa khawatir keadaan Ammar ini. Kalau memang lumpuh, kan kasihan juga, masa depannya kan masih panjang, anaknya masih kecil-kecil. Ya kalau dia lumpuh kan enggak bisa berkarya lagi. Inilah yang dikhawatirkan keluarga," kata Jon.

NASIONAL

Listyo Tumbang, Mahfud: Kasus yang Menyangkut Lingkar Jokowi Saatnya Dibuka

Oleh Redaksi · 20 Nov, 08.09 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai sejumlah laporan hukum yang selama ini belum ditindaklanjuti perlu dibuka kembali, termasuk perkara yang dikaitkan dengan lingkaran Presiden ke-7 RI Joko Widodo.Menurut Mahfud, melemahnya kekuatan yang selama ini dianggap melindungi perkara-perkara tersebut, menyusul tumbangnya Listyo Sigit Prabowo, membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk kembali mengusut laporan yang tertahan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Dalam perbincangan tersebut, Rizal menanyakan kemungkinan persoalan hukum yang pernah muncul terkait Jokowi kembali diproses. Ia juga menyinggung posisi Listyo Sigit yang selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan Jokowi.

Mahfud menilai kemungkinan tersebut terbuka karena laporan terkait sudah diterima secara resmi oleh aparat penegak hukum.

"Itu sangat mungkin dimunculkan, karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi," kata Mahfud.

Ia menilai keberadaan Listyo sebelumnya menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah perkara sulit ditindaklanjuti.

"Kalau dulu mungkin agak susah karena masih ada Listyo. Apa pun, ada Listyo, enggak bisa," katanya.

"Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi."

Mahfud berharap aparat kepolisian kembali menjalankan tugas penegakan hukum tanpa pandang bulu.

"Listyo sudah tidak ada sekarang, supaya polisi-polisi yang di bawah kembali berkiblat ke pusat, yang hukum tegakkan kepada siapa pun," ujar Mahfud.

Meski demikian, Mahfud menyadari pembukaan sejumlah perkara secara bersamaan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Karena itu, ia menyerahkan penentuan perkara yang perlu diprioritaskan kepada pemerintah.

"Kalau jadi pemerintah, mestinya tahu urusan prioritasnya mana untuk menyelesaikannya, tapi tetap menuju tegaknya hukum," ujarnya.

ACEH

Uroe Lahee ke-70 Aceh Besar Digelar Sepekan, Panitia Siapkan Beragam Kegiatan Religius dan Sosial

Oleh Redaksi · 19 Nov, 15.30 WIB

ACEH BESA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kabupaten Aceh Besar tahun 2026 akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga, dan hiburan masyarakat.

Rangkaian peringatan yang dikemas dalam agenda Uroe Lahee ke-70 tersebut berlangsung selama tujuh hari, mulai 18 hingga 24 November 2026, dengan pusat kegiatan di Lapangan Bola Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Ketua Panitia Pelaksana Uroe Lahee ke-70 Kabupaten Aceh Besar, Abdullah, yang juga Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar Bidang Administrasi Umum, menyampaikan bahwa peringatan tujuh dekade Kabupaten Aceh Besar bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum memperkuat kebersamaan, rasa syukur, serta refleksi perjalanan pembangunan daerah.

Dalam laporan panitia saat pembukaan, Rabu (18/11/2026) malam, Abdullah menjelaskan, pelaksanaan peringatan Uroe Lahee ke-70 berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 yang menyebutkan 24 November 1956 sebagai tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956.

Kegiatan tersebut juga mengacu pada Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 1400 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Besar ke-70.

Menurutnya, peringatan tahun ini memiliki makna penting sebagai momentum evaluasi dan refleksi bersama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam melanjutkan pembangunan Aceh Besar yang berlandaskan syariat Islam serta kearifan lokal Aceh Rayeuk.

Berbagai agenda telah disiapkan untuk memperkuat identitas dan sejarah daerah, mempererat ukhuwah dan persatuan, melestarikan nilai agama dan budaya, mendorong kepedulian sosial serta ekonomi rakyat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan sportivitas.

Salah satu kegiatan utama adalah lomba zikir maulid yang diikuti 20 kelompok perwakilan kecamatan se-Aceh Besar. Perlombaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19–20 November 2026 di lokasi utama Lapangan Bola Lubuk Sukon.

Selanjutnya, Musabaqah Dalail Khairat akan diikuti 20 kelompok dari dayah dan pesantren se-Aceh Besar pada 21–23 November 2026. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat syiar Islam serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap tradisi keagamaan.

Tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial dan keagamaan, panitia juga menghadirkan berbagai pelayanan langsung kepada masyarakat. Di antaranya sunat massal dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Aceh Besar selama 18–24 November 2026.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar turut menyelenggarakan festival anak, hafalan Juz Amma tingkat SD-SMP, lomba …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

IPS Aceh Barat Tembus 2,99, Raih Predikat Baik

Oleh Biro Meulaboh · 19 Nov, 20.07 WIB

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,99 dengan predikat Baik berdasarkan hasil akhir Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan hasil evaluasi sebelumnya. Pada 2023, Aceh Barat memperoleh nilai 1,69 dengan predikat Cukup, kemudian meningkat menjadi 2,62 pada 2024 dan kembali naik menjadi 2,99 pada 2026.

Nilai tersebut juga melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Barat.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM., menyebut capaian tersebut harus menjadi momentum untuk memperluas pembinaan statistik sektoral di seluruh perangkat daerah.

Ia meminta agar pembinaan tidak hanya difokuskan pada OPD yang menjadi lokus penilaian, tetapi juga menjangkau 10 OPD lainnya yang dipersiapkan mengikuti EPSS 2028.

"Seluruh perangkat daerah harus mulai mempersiapkan tata kelola statistik sektoral sejak dini. Sepuluh OPD tersebut diharapkan mulai melakukan pembenahan agar pada 2027 sudah dapat mengikuti tahapan pembinaan dan penilaian sebagai persiapan menghadapi EPSS 2028," kata Tarmizi.

Bupati juga menginstruksikan Diskominsa selaku Walidata untuk memberikan pendampingan secara berkelanjutan, meliputi pemahaman indikator EPSS, penguatan tata kelola data, pemenuhan standar dan metadata, penyusunan bukti dukung, hingga pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Diskominsa Aceh Barat, Dedi Mulianda, S.IP., M.Si., mengatakan peningkatan nilai IPS merupakan hasil kolaborasi antara Diskominsa dan perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola statistik sektoral.

Pada EPSS 2026, terdapat tiga perangkat daerah yang terlibat, yakni Diskominsa, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penggugat Ijazah Gibran Laporkan Saksi Ahli Sidang MK ke Polda Metro Jaya

Oleh Redaksi · 20 Nov, 08.44 WIB



BANDA ACEH -Penggugat surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA luar negeri mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, resmi melaporkan saksi ahli Ina Setiawati alias Ina Liem ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 26 Oktober 2026. Pelaporan ini berkaitan dengan kesaksian Ina Liem selaku ahli konsultan pendidikan yang dihadirkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Oktober 2026.

"Saya di sini dalam rangka panggilan Polda untuk pemeriksaan terhadap laporan saya adanya dugaan keterangan palsu di atas sumpah yang diberikan oleh seorang ahli yang mengaku ahli di sidang Mahkamah Konstitusi," ujar Subhan kepada wartawan, Kamis, 19 November 2026.

Subhan menilai pernyataan Ina Liem, yang saat itu hadir sebagai ahli dari pihak relawan Gibran, tidak benar dan telah memengaruhi opini publik selama proses persidangan berlangsung.

"Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN. Itu gara-gara ini, gara-gara apa? Kesaksian palsu dari ahli ini," kata Subhan.

Menanggapi laporan tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa pihak pelapor berinisial MS atau Subhan telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk proses awal penanganan perkara.

"Benar, hari ini (Kamis 19 November 2026) MS selaku pelapor hadir dalam rangka gelar perkara awal terkait laporannya terhadap IS. Namun, permintaan klarifikasi terhadap pelapor belum dilakukan karena pelapor masih akan melengkapi bukti permulaan terlebih dahulu. Selanjutnya, penyelidik akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Budi.

NASIONAL

7 Tahun ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung, Mahfud MD: Mungkin Dia Banyak Titipan

Oleh Redaksi · 20 Nov, 09.33 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti lamanya masa jabatan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung.

Burhanuddin tercatat telah menduduki posisi tersebut selama tujuh tahun dan menjadi salah satu pejabat penting yang paling lama bertahan.

Mahfud bahkan melontarkan dugaan bahwa panjangnya masa jabatan Burhanuddin berkaitan dengan banyaknya kepentingan atau titipan yang melekat di lingkungan institusi Kejaksaan Agung.

"Salah satu pejabat penting yang terlama. Saya kira kejaksaan Pak. Jaksa Agung. Iya. Sudah tujuh tahun Pak," kata Mahfud, seperti dikutip dari kanal YouTube, Jumat (20/11/2026).

Tak berhenti di situ, Mahfud menduga terdapat banyak kepentingan yang membuat pergantian pucuk pimpinan Kejaksaan Agung bukan perkara sederhana.

"Mungkin dia banyak titipan. Yang kalau ini diganti ini banyak yang merotol nih," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyinggung kekuatan yang selama ini diduga menjadi beking bagi sejumlah persoalan hukum. Menurutnya, kekuatan tersebut kini mulai runtuh.

Kondisi itu, kata Mahfud, seharusnya menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung untuk bergerak dan menertibkan penegakan hukum tanpa lagi bermain-main dengan berbagai titipan kepentingan.

Pernyataan Mahfud tersebut disampaikan dalam tayangan kanal YouTube Terus Terang yang dikutip pada Jumat (20/11/2026).

ACEH

Di Samalanga, Dek Fadh Kenang Keteladanan Abon dan Pererat Silaturahmi Ulama

Oleh Redaksi · 19 Nov, 18.18 WIB



Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H. Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh, menghadiri Haul ke-39 Tgk. H. Abon Abdul Aziz bin Muhammad Shaleh (Abon Samalanga) di Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga, Desa Mideun Jok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Kamis

BIREUEN – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H. Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh, menghadiri Haul ke-39 Tgk. H. Abon Abdul Aziz bin Muhammad Shaleh (Abon Samalanga) di Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga, Desa Mideun Jok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Kamis (19/11/2026).

Kehadiran Dek Fadh menjadi wujud penghormatan atas jasa dan perjuangan Abon Samalanga dalam mengembangkan pendidikan Islam serta menjaga tradisi keilmuan dan syiar Islam di Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Dek Fadh juga bersilaturahmi dengan Tgk. H. Sofyan Mahdi (Abon Arongan). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus memperkuat hubungan antara Pemerintah Aceh dan kalangan ulama.

Dek Fadh menegaskan, ulama memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Aceh, tidak hanya sebagai panutan umat, tetapi juga sebagai sumber nasihat dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

"Ulama merupakan pilar penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kehidupan masyarakat Aceh. Karena itu, silaturahmi dan sinergi antara ulama dan pemerintah harus terus kita rawat demi kemajuan Aceh," ujar Dek Fadh.

Ia berharap, Haul ke-39 Abon Samalanga menjadi momentum untuk mengenang keteladanan ulama sekaligus meneruskan perjuangan, menjaga tradisi keilmuan, dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan.

Turut mendampingi Wagub Aceh, Karo Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, Kepala Sekretariat MPU Aceh Zahrol Fajri, S.Ag., M.H., serta Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Muhsin Thahir, S.Pd.I., M.Pd.I. Tgk. Muhsin.[]

TEKNOLOGI

3 Fitur Kamera Nirkabel untuk Keamanan Malam yang Lebih Baik

Oleh Redaksi · 19 Nov, 18.34 WIB



Teknologi Imou Intelligent ISP memberikan gambar jernih meskipun di kondisi minim cahaya. Sebuah mobil van berwarna perak dengan plat nomor BK 3706 AG terlihat sangat jelas di malam hari. Gambar ini mendemonstrasikan keunggulan teknologi citra ISP cerdas dari Imou dalam

BANDA ACEH - Keamanan malam bergantung pada lebih dari sekadar menempatkan sebuah kamera di luar.

Cahaya redup mengubah seberapa baik sistem menangkap wajah, pergerakan, dan detail penting, sehingga fitur kamera nirkabel yang tepat menjadi paling penting setelah matahari terbenam.

Jika tujuan Anda adalah perlindungan yang lebih baik di area pintu masuk, jalan masuk, halaman, atau bangunan terpisah, fokuslah pada tiga hal utama: penglihatan malam yang kuat, video beresolusi tinggi, dan peringatan yang lebih cerdas dengan pencegahan aktif.

Bersama-sama, fitur-fitur ini membantu Anda melihat lebih jelas, mengidentifikasi kejadian dengan lebih akurat, dan merespons lebih cepat ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi.

Model luar ruang yang dirancang dengan baik seperti AOV PT Pro menggabungkan kemampuan ini dalam format yang praktis, tetapi kuncinya adalah memahami apa yang sebenarnya dilakukan setiap fitur bagi kinerja di malam hari dan bagaimana hal itu meningkatkan keamanan di dunia nyata ketika visibilitas terbatas.

Inframerah vs. Penglihatan Malam Berwarna Penuh: Apa Bedanya?

Penglihatan malam adalah fitur pertama yang perlu dievaluasi karena kegelapan dengan cepat mengurangi kejernihan gambar.

Penglihatan malam inframerah menggunakan cahaya IR yang tidak terlihat untuk menghasilkan rekaman hitam-putih, yang biasanya memberikan kontras kuat dan visibilitas andal pada jarak yang lebih jauh.

Penglihatan malam berwarna penuh bergantung pada cahaya yang tersedia atau pencahayaan tambahan untuk mempertahankan detail warna seperti pakaian, kendaraan, atau tanda pada paket.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

13 BERITA

ACEH

Green Policing Polda Aceh: Sinergi Pelestarian Lingkungan dan Penguatan Kepedulian Sosial di Dayah Daruzzahidin

Oleh Redaksi · 20 Nov, 23.18 WIB



ACEH BESAR – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh, Brigjen Pol. Latif Usman, memimpin kegiatan penanaman pohon (Green Policing) dan penyaluran bantuan sosial di Dayah Daruzzahidin, Jalan Blang Bintang Lama Km 10, Desa Lamceu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari implementasi Program Quick Wins Kapolri tersebut menjadi wujud kepedulian Polda Aceh terhadap kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Polri, ulama, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat.

Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Pimpinan Dayah Daruzzahidin, Abi Dr. H. Abdur Razak, Lc., M.A., bersama para santri dan masyarakat setempat.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, mengatakan bahwa program Green Policing merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata Polri dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Melalui kegiatan tersebut, Polri mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus membangun kesadaran menjaga alam bagi generasi mendatang.

“Hari ini Bapak Wakapolda Aceh bersama pejabat utama Polda Aceh melaksanakan penanaman pohon di lingkungan Dayah Daruzzahidin. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan suasana belajar yang lebih asri bagi para santri, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta memperkuat kepedulian sosial melalui penyerahan bantuan sembako,” ujar Joko Krisdiyanto.

Menurutnya, keterlibatan lembaga pendidikan keagamaan dalam gerakan pelestarian lingkungan memiliki arti penting karena pesantren dan dayah merupakan salah satu pusat pendidikan karakter yang dapat menanamkan nilai kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap alam sejak dini.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakapolda Aceh bersama rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas di kompleks Dayah Daruzzahidin. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam pendiri dayah, almarhum Abu H. Abdullah, untuk memanjatkan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh pendiri lembaga pendidikan tersebut.

Sementara itu, Abdur Razak menyampaikan apresiasi atas kepedulian Polda Aceh yang telah melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan bakti sosial di lingkungan dayah. Menurutnya, upaya menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran agama yang perlu ditanamkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para santri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, Kabidpropam Polda Aceh Kombes Pol. Carlie Syahputra Bustamam, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pj Sekda Aceh Buka Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Oleh Redaksi · 19 Nov, 15.11 WIB

BANDA ACEH — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, membuka Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Anjong Mon Mata, Kamis (19/11/2026). Taufik hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan sambutan Gubernur Aceh sekaligus secara resmi membuka rapat koordinasi yang membahas percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.

Dalam sambutan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), kementerian dan lembaga, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta seluruh pihak yang telah mendukung penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.

Gubernur mengatakan, bencana tersebut telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan rumah, infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan mata pencaharian warga.

Meski berbagai upaya penanganan dan pemulihan telah menunjukkan perkembangan, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan bersama. Di antaranya pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

“Terlebih, terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah semakin menambah tantangan dalam proses pemulihan. Karena itu, diperlukan perhatian, komitmen, dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak,” ujar Taufik membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap pelaksanaan Rencana Induk PRRP Sumatera tahun 2027–2028 agar seluruh program …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Nanggroe Terima Diplomat AS, Bahas Penguatan Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Pembangunan Aceh

Oleh Redaksi · 20 Nov, 22.21 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan kehormatan Penasihat Politik (Political Counselor) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, David Muehlke, bersama delegasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Medan.

Pertemuan yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat 20 November 2026, tersebut menjadi bagian dari komunikasi dan hubungan persahabatan yang terus terjalin, sekaligus membuka ruang pertukaran pandangan mengenai perkembangan Aceh, keberlanjutan perdamaian, serta peluang kerja sama di berbagai bidang pembangunan.

Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan konstruktif.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi diplomatik dan pertukaran pandangan mengenai perkembangan Aceh, khususnya penguatan perdamaian, pelaksanaan kekhususan Aceh, pembangunan ekonomi, serta peluang peningkatan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Zulfikar Idris.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Internasional, Dr. Mohammad Raviq. Sementara itu, David Muehlke hadir bersama Spesialis Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Aang A. Bakar, serta Asisten Politik Konsulat Amerika Serikat di Medan, Zulkarnain Lubis.

Sejumlah isu strategis menjadi bagian dari pertukaran pandangan, antara lain perkembangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, upaya peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana, percepatan pembangunan ekonomi, serta keberlanjutan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005.

Wali Nanggroe menegaskan pentingnya menjaga perdamaian Aceh sebagai capaian bersejarah yang tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi bagian dari keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan rekonsiliasi.

Dalam konteks tersebut, pelaksanaan berbagai amanat perdamaian dan kekhususan Aceh dipandang sebagai proses berkelanjutan yang perlu terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertemuan juga membahas pentingnya memperluas hubungan persahabatan antara masyarakat Aceh dan Amerika Serikat melalui program-program yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Delegasi Amerika Serikat menyampaikan ketertarikan untuk mendengarkan berbagai pandangan dan masukan mengenai peluang pengembangan hubungan jangka panjang, termasuk sebagai bahan informasi bagi kepemimpinan diplomatik Amerika Serikat pada masa mendatang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LAPANGAN PEKERJAAN

CPNS Guru 2026 Tanpa Afirmasi Usia, Pemerintah Batasi Pelamar Maksimal 35 Tahun

Oleh Van · 19 Nov, 23.09 WIB

JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan afirmasi atau perlakuan khusus terkait batas usia dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru tahun 2026.

Hal disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).

"Jadi sekali lagi untuk CPNS guru 2026 tidak ada afirmasi umur," kata Nunuk.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Jelang Penyaluran Bantuan, Dinas Pangan Aceh Besar Pastikan Kesiapan Beras di Gudang Bulog

Oleh Redaksi · 20 Nov, 21.10 WIB



ACEH BESAR — Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar bersama Perum Bulog melakukan pengecekan kesiapan beras bantuan pangan untuk masyarakat di Kompleks Pergudangan GSP Bulog Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (20/11/2026). Stok beras untuk alokasi Oktober hingga Desember 2026 tersebut telah tersedia di gudang dan tinggal menunggu penyesuaian jadwal penyaluran yang direncanakan berlangsung awal Desember mendatang.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, Alyadi, mengatakan pengecekan tersebut merupakan bagian dari koordinasi rencana penyaluran sekaligus memastikan kesiapan beras yang akan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Menurutnya, bantuan pangan tersebut mencakup alokasi tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram untuk satu tahap penyaluran.

"Bantuan pangan ini direncanakan disalurkan pada awal Desember mendatang untuk memenuhi alokasi tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember. Saat ini kita melakukan koordinasi dan pengecekan kesiapan beras, sehingga nantinya penyaluran dapat berjalan lancar," ujar Alyadi.

Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat segera dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga masyarakat penerima manfaat bisa memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

"Kami mengharapkan masyarakat penerima manfaat dapat bersabar menunggu proses penyaluran. Pemerintah bersama Bulog terus melakukan koordinasi agar bantuan ini bisa segera disalurkan sesuai jadwal. Mudah-mudahan seluruh proses berjalan lancar sehingga bantuan beras ini dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat," tambahnya.

Hal senada disampaikan Asisten Manajer (Asman) Manajemen Mutu Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh, Resi Usfandy. Ia menjelaskan, penyaluran bantuan pangan di sejumlah daerah di Aceh masih dalam tahap persiapan. Sejauh ini, Kota Banda Aceh menjadi daerah yang telah lebih dahulu memulai penyaluran.

"Untuk saat ini, yang sudah mulai melakukan penyaluran baru Kota sedangkan daerah lainnya masih dalam persiapan. Khusus Aceh Besar, sudah kita sepakati penyalurannya pada awal Desember. Untuk tanggal pastinya akan kita informasikan kembali," jelas Resi.

Terkait jumlah penerima dan total beras yang akan disalurkan di Aceh Besar, Resi mengatakan angka finalnya belum dapat dipastikan karena masih mengalami perubahan mengikuti pemutakhiran data penerima bantuan.

"Untuk jumlahnya saat ini belum ada kepastian karena angkanya masih naik turun. Bahkan, pada minggu lalu alokasi untuk Aceh mengalami penurunan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pj Sekda Aceh Hadiri Seminar Refleksi Satu Tahun Bencana Hidrometeorologi

Oleh Redaksi · 20 Nov, 20.32 WIB



BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menghadiri Seminar Refleksi Satu Tahun Bencana Hidrometeorologi Aceh yang berlangsung di Hotel Amel Convention Hall, Jumat (20/11/2026).

Seminar tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025.

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang juga Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, para narasumber, akademisi, insan pers, serta sejumlah peserta dari berbagai unsur.

Seminar tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi untuk mengevaluasi penanganan bencana selama setahun terakhir sekaligus menghasilkan masukan dan rekomendasi bagi percepatan pemulihan serta penguatan kesiapsiagaan bencana di Aceh.

Kehadiran Pj Sekda Aceh dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Aceh terhadap upaya evaluasi dan penguatan penanganan bencana di daerah. []

TEKNOLOGI

Dapatkah Kamera CCTV Outdoor Bekerja Tanpa Wi-Fi?

Oleh Redaksi · 19 Nov, 17.11 WIB



Kolase ini menampilkan penerapan teknologi pengawasan di berbagai lingkungan, termasuk rumah tinggal, area parkir, dan pusat perbelanjaan. Setiap gambar menonjolkan fitur canggih

BANDA ACEH - Ya, kamera CCTV outdoor dapat berfungsi tanpa Wi-Fi. Banyak kamera keamanan tetap merekam, mendeteksi gerakan, dan menyimpan rekaman secara lokal bahkan ketika tidak ada jaringan nirkabel yang tersedia.

Perbedaan utamanya adalah Wi-Fi terutama membantu untuk akses jarak jauh, notifikasi melalui aplikasi, pencadangan ke cloud, dan pemantauan langsung dari lokasi lain.

Jika tujuan Anda adalah pengawasan di lokasi, kamera tetap dapat memberikan pemantauan yang andal melalui penyimpanan lokal, koneksi kabel, atau jaringan seluler.

Hal ini membuat pengaturan tanpa Wi-Fi berguna untuk garasi, pertanian, lokasi konstruksi, rumah liburan, dan area lain dengan layanan internet yang lemah atau tidak tersedia.

Memahami bagaimana sistem ini bekerja membantu Anda memilih pengaturan yang tepat untuk properti Anda, menghindari membayar fitur yang mungkin tidak Anda perlukan, dan memastikan rekaman penting tetap tersedia ketika paling dibutuhkan.

Perbedaan Antara Wi-Fi dan Konektivitas Internet

Wi-Fi dan akses internet saling berkaitan, tetapi keduanya bukan hal yang sama. Wi-Fi hanyalah metode nirkabel yang digunakan kamera untuk terhubung ke jaringan lokal.

Konektivitas internet berarti jaringan tersebut dapat menjangkau layanan online, seperti aplikasi pemantauan jarak jauh atau penyimpanan cloud.

Kamera CCTV luar ruangan dapat berfungsi pada jaringan lokal tanpa internet, atau dapat bekerja sepenuhnya offline jika merekam langsung ke penyimpanan internal atau perekam.

Beberapa model juga menggunakan kabel Ethernet sebagai pengganti Wi-Fi untuk koneksi kabel yang stabil. Dalam praktiknya, hilangnya Wi-Fi atau internet tidak selalu menghentikan pengawasan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Nomor Urut 3, Muhammad Saman Bidik

Oleh Van · 20 Nov, 19.24 WIB



Muhammad Saman maju sebagai calon nomor urut 3 untuk posisi Ketua PWI Aceh periode 2026-2031.

BANDA ACEH – Kontestasi pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031 mulai mengerucut pada pertarungan gagasan pembenahan organisasi. Muhammad Saman, yang memperoleh nomor urut 3, menawarkan agenda penguatan transparansi, profesionalisme, perlindungan wartawan, hingga kesejahteraan anggota sebagai arah perubahan kepemimpinan PWI Aceh.

Nomor urut tersebut diperoleh Saman dalam pengundian kandidat di Kantor PWI Aceh, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026. Ia akan berhadapan dengan Sayuti Achmad yang mendapat nomor urut 1 dan petahana M. Nasir Nurdin dengan nomor urut 2.

Ketiga kandidat telah melewati proses verifikasi persyaratan pencalonan dan dinyatakan memenuhi ketentuan berdasarkan keputusan PWI Pusat. Pengundian nomor urut menjadi salah satu tahapan menjelang Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026.

Dalam tahapan tersebut, para calon juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesepakatan menjaga pelaksanaan konferensi agar berlangsung secara demokratis, jujur, profesional, dan bermartabat.

Bagi Muhammad Saman, pencalonan kali ini bukan sekadar perebutan kursi ketua, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi organisasi. Ia membawa slogan "Melanjutkan yang Baik, Memperbaiki yang Kurang", yang menitikberatkan pada keberlanjutan program positif sekaligus evaluasi terhadap berbagai kelemahan yang masih membutuhkan perhatian.

Visi yang ditawarkan Saman mengarah pada pembentukan PWI Aceh sebagai organisasi profesi yang memiliki integritas, terbuka dalam tata kelola, profesional dalam menjalankan fungsi, independen, serta mampu menjaga soliditas dan memperjuangkan kepentingan anggotanya.

PWI, menurut arah gagasan yang dibawanya, harus lebih dari sekadar wadah berkumpulnya wartawan. Organisasi profesi tersebut diharapkan memberikan dampak konkret bagi anggotanya, termasuk mereka yang bekerja di kabupaten dan kota dengan kondisi serta tantangan jurnalistik yang berbeda-beda.

Sejumlah agenda pembenahan menjadi bagian dari tawaran program Saman. Di antaranya memperkuat integritas organisasi, meningkatkan transparansi pengelolaan, membangun kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan anggota, meningkatkan kompetensi wartawan, serta memperkuat solidaritas dan perlindungan profesi.

Ia juga mendorong agar perhatian organisasi tidak hanya terpusat di tingkat provinsi. Penguatan PWI kabupaten dan kota, pemerataan pembinaan, peningkatan kesejahteraan anggota, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan industri media menjadi bagian dari agenda yang disiapkan.

Pembenahan administrasi, pengelolaan keuangan, dan manajemen organisasi turut menjadi perhatian. Saman menginginkan sistem kerja yang lebih tertata, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan dan program organisasi benar-benar berorientasi pada kebutuhan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Inspektorat Aceh Besar Gelar Bimtek SPIP dan RTP

Oleh Redaksi · 20 Nov, 20.04 WIB



ACH BESAR — Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan adaptif terhadap potensi hambatan terus diperkuat dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pemerintah melalui Inspektorat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pemetaan, Pengendalian, dan Evaluasi Risiko bertempat di kantor BPKP Perwakilan Aceh, mulai 18 hingga 20 November 2026.

Kegiatan strategis ini diikuti oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kehadiran lintas perangkat daerah ini menandakan keseriusan bersama dalam menyelaraskan langkah pengawasan internal dan manajemen risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan tugas sehari-hari.

Inspektur Aceh Besar Muharrir Al Agshar mengatakan, dalam dinamika birokrasi modern, setiap program dan layanan publik memiliki potensi risiko—mulai dari kendala administrasi, keterbatasan sumber daya, hingga potensi penyimpangan prosedur.

"Melalui pemetaan risiko yang terukur, pengendalian yang tepat sasaran, serta evaluasi yang berkelanjutan, setiap OPD diharapkan mampu mendeteksi titik rawan lebih awal sebelum berdampak pada kinerja organisasi," ujarnya.

Ia menambahkan hasil dari proses pemetaan dan evaluasi risiko tersebut tidak berhenti pada tataran analisis, melainkan dirumuskan ke dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

"Maka kemudian dokumen RTP ini menjadi peta jalan operasional bagi masing-masing OPD untuk memastikan langkah mitigasi berjalan konsisten, terpantau, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kolaborasi antara Inspektorat Aceh Besar dan BPKP Perwakilan Aceh dalam kegiatan ini juga memperkuat pendampingan teknis agar penerapan sistem pengendalian intern berjalan selaras dengan standar pengawasan nasional," kata Muharrir.

Peserta kegiatan dari Doskominfo Aceh Besar mengaku dengan pemahaman yang seragam di seluruh OPD, Kabupaten Aceh Besar diharapkan semakin mantap menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan risiko tata kelola.

"Dengan pemahaman yang seragam di seluruh OPD, Pemkab Aceh Besar diharapkan semakin mantap menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan risiko tata kelola," imbuh Sirath selaku Penata Layanan Operasional di Diskominfo Aceh Besar.[]

ACEH

BBPOM Aceh Edukasi 59 Anak Kelompok Rentan tentang Keamanan Pangan

Oleh Redaksi · 20 Nov, 19.10 WIB



BANDA ACEH – Kepedulian terhadap kesehatan dan perlindungan kelompok rentan terus diwujudkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) melalui edukasi keamanan pangan yang menyenangkan dan mudah dipahami.

Kali ini, BBPOM Aceh menyambangi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe untuk melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 59 anak asuh panti dan menjadi bagian dari pelaksanaan inovasi Malahayati (Melayani Kelompok Rentan Sepenuh Hati).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Seksi Pelayanan Dasar UPTD Panti Sosial Aneuk Nanggroe, Lusi Maiyulita. Sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian BBPOM Aceh dalam memastikan kelompok rentan, termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, mendapatkan akses informasi dan edukasi mengenai pentingnya memilih serta mengonsumsi pangan yang aman, sehat, dan bermutu.

UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe sendiri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Sosial Aceh yang memiliki tugas memberikan pelayanan, pengasuhan, penerimaan, dan perlindungan kepada anak jalanan, anak terlantar, anak korban kekerasan atau perlakuan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Materi edukasi disampaikan oleh Ketua Tim Program Prioritas Nasional BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih. Dalam penyampaiannya, Desi mengajak anak-anak mengenali pentingnya keamanan pangan serta memahami lima kunci keamanan pangan sebagai kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Lima kunci keamanan pangan yang diperkenalkan meliputi Kenali Pangan Aman, Beli Pangan Aman, Baca Label dengan Seksama, Jaga Kebersihan dan Perhatikan serta catat jika menemukan jajanan mencurigakan, tidak layak konsumsi, atau menimbulkan keluhan Kesehatan.

Desi menjelaskan bahwa keamanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab produsen atau penjual makanan, tetapi juga perlu diperhatikan oleh setiap orang sebagai konsumen. Anak-anak perlu dibekali pengetahuan agar mampu mengenali pangan yang aman, memperhatikan kebersihan makanan, serta lebih cermat sebelum mengonsumsi produk pangan.

“Anak-anak juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan pangan untuk dirinya sendiri. Mulailah dari kebiasaan sederhana, seperti mencuci tangan sebelum makan, memilih makanan yang bersih dan tertutup, memperhatikan kondisi kemasan, serta memastikan makanan yang dikonsumsi masih layak. Kebiasaan kecil ini dapat menjadi langkah besar untuk menjaga kesehatan,” jelas Desi.

Suasana sosialisasi berlangsung meriah dan interaktif. Anak-anak asuh tampak antusias mengikuti pemaparan materi, menjawab pertanyaan, serta berbagi pengalaman mengenai kebiasaan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wagub dan Kapolda Tinjau Hunian Korban Bencana, 30 Excavator Bantuan Prabowo untuk Aceh

Oleh Redaksi · 20 Nov, 19.53 WIB



ACEH TAMIANG – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah bersama Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, meninjau sejumlah hunian masyarakat terdampak bencana serta bantuan 30 unit excavator dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Aceh Tamiang, Jumat (20/11/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan fasilitas hunian sekaligus dukungan sarana dan prasarana untuk mempercepat penanganan serta pemulihan pascabencana.

Rombongan bertolak ke Aceh Tamiang menggunakan helikopter Polda Aceh dan tiba di Stasiun Kereta Api Tanjung Mancang.

Kedatangan Wagub dan Kapolda disambut Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi bersama jajaran Forkopimda.

Dalam kunjungan itu, Fadhlullah terlebih dahulu meninjau hunian tetap (huntap) bantuan Polri di kawasan Tanjung. Selanjutnya, rombongan meninjau hunian sementara (huntara) yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum di Kampung Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, guna memastikan kondisi bangunan setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu.

Wagub juga meninjau bantuan 30 unit excavator dari Presiden Prabowo melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Sumatera. Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan dampak bencana, normalisasi sungai, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan nyata bagi masyarakat Aceh.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dukungan pembangunan hunian dan bantuan alat berat ini sangat berarti dalam mempercepat pemulihan serta membantu masyarakat bangkit kembali pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Ia berharap sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Aceh, tegasnya, akan terus mengawal dan memastikan seluruh program pemulihan berjalan optimal sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.[]

ACEH

Tanah Blang Padang Memasuki Babak Baru, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf

Oleh Redaksi · 20 Nov, 16.42 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Polemik panjang terkait tanah Blang Padang akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan lahan bersejarah tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Langkah tersebut dilakukan setelah surat resmi pemerintah pusat diterima pada November 2026. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, atas dibukanya jalan penyelesaian permanen.

"Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut," kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026).

"Terima kasih atas kepedulian Bapak Presiden dan Menko Yusril terhadap penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh."

Bagi Mualem, keputusan langsung Presiden mencerminkan penghormatan negara terhadap sejarah, nilai keagamaan, dan aspirasi masyarakat Aceh. Jalur isbat wakaf di Mahkamah Syar'iyah dipilih untuk memberikan kepastian hukum agar persoalan tersebut tidak memicu sengketa baru di kemudian hari.

Penyelesaian ini dirancang agar tidak merugikan pihak mana pun. Selain mengembalikan fungsi historis Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, pemerintah pusat menyiapkan lahan pengganti yang representatif bagi Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda.

"Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga," ujar Mualem.

Di tingkat daerah, Pemerintah Aceh kini menyiapkan koordinasi lintas pihak untuk melengkapi berkas permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Mualem menegaskan agar seluruh tahapan ditempuh secara arif dan bijaksana, serta tetap berada dalam koridor hukum demi menjaga hubungan kelembagaan dan kepentingan bersama.

"Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum," tegasnya.

Dasar Surat Menko Kumham Imipas

Pengajuan isbat wakaf ini bertumpu pada surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026, yang ditembuskan kepada …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pj Sekda Aceh Paparkan Kondisi Bencana dan Capaian Pemulihan, 17 Kabupaten/Kota Masih dalam Penanganan

Oleh Redaksi · 20 Nov, 16.15 WIB



BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, memaparkan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi serta kesiapsiagaan Pemerintah Aceh menghadapi cuaca ekstrem dan banjir.

Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menyampaikan capaian pemulihan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh yang berlangsung di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kamis (19/11/2026). Kegiatan dipandu Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya.

Dalam pemaparannya, Taufik menyebutkan sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh masih berada dalam tahapan penanganan bencana dengan status berbeda. Berdasarkan data per 18 November 2026, lima kabupaten/kota berstatus siaga darurat, empat berstatus darurat, dan delapan lainnya berada dalam masa transisi darurat.

Sementara itu, dua daerah, yakni Nagan Raya dan Aceh Besar, telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di tengah proses pemulihan pascabencana, Aceh juga kembali menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Data per 18 November 2026 pukul 17.00 WIB mencatat sebanyak 25.244 jiwa atau 6.601 kepala keluarga terdampak. Dari jumlah tersebut, 844 jiwa atau 265 kepala keluarga masih mengungsi.

Dampak banjir tercatat di empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen. Sebagian rumah warga di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil masih terendam, sedangkan kondisi di Aceh Selatan sebagian telah surut. Dampak di Bireuen masih dalam pendataan.

Untuk mengantisipasi perkembangan cuaca ekstrem, Pemerintah Aceh menetapkan masa siaga darurat provinsi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Taufik menjelaskan, langkah kesiapsiagaan pemerintah meliputi pemantauan wilayah rawan, koordinasi peringatan dini dengan BMKG dan BPBA, serta pemetaan titik terdampak, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan satuan tugas, mempercepat evakuasi serta penyelamatan masyarakat, dan memastikan ketersediaan logistik, layanan kesehatan, serta sarana pendukung lainnya.

Perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi perhatian, terutama lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pemerintah turut menekankan pentingnya penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan akurat dengan mengutamakan keselamatan warga.

Sementara itu, Safrizal ZA memaparkan sejumlah capaian rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh selama satu tahun penanganan bencana.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Perjuangkan RS Regional dan Jalan, Tarmizi Apresiasi Dukungan DPRA

Oleh Biro Meulaboh · 20 Nov, 15.34 WIB



Bupati Tarmizi bersama Anggota DPRA, FOTO/ist

BANDA ACEH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., terus mengupayakan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Meulaboh serta sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperjuangkan dukungan anggaran melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Untuk memastikan program pembangunan tersebut mendapat dukungan, Tarmizi mengaku telah menemui pimpinan DPRA, para ketua fraksi, Ketua Badan Legislasi (Banleg), serta sejumlah anggota DPRA guna membahas alokasi anggaran bagi kelanjutan pembangunan RS Regional Meulaboh, Jalan Peribu–Kuala Bhee, dan Jalan Meulaboh–Tutut.

Tarmizi menyampaikan bahwa pembahasan bersama Badan Anggaran DPRA mendapat respons positif. Sejumlah anggota dewan dinilainya menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan Aceh Barat, termasuk anggota DPRA yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) lain.

"Alhamdulillah, dalam pembahasan di Badan Anggaran DPRA, teman-teman menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan program ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berjuang, meskipun berasal dari dapil lain," ungkap Tarmizi, kemarin.

Namun, di tengah upaya memperjuangkan anggaran tersebut, Bupati Aceh Barat itu mengaku kecewa karena masih ada pihak yang diduga berupaya menghambat agar perjuangan pembangunan tersebut tidak berhasil.

Menurutnya, pembangunan RS Regional Meulaboh dan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan masyarakat yang seharusnya mendapat dukungan bersama, bukan justru dijadikan bagian dari kepentingan politik maupun persaingan pribadi.

Tarmizi menyayangkan apabila ada pihak yang telah mendapatkan amanah masyarakat, tetapi justru tidak mendukung program pembangunan yang manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat di daerah asalnya.

Ia berharap semua pihak dapat mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak menjadikan agenda politik Pilkada mendatang sebagai alasan untuk menghambat pembangunan daerah.

"Yang sangat menyakitkan dan membuat kami kecewa, ada pihak yang berupaya menghalangi agar perjuangan ini gagal. Seharusnya ikut membantu, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai kepentingan pribadi dan politik mengorbankan pembangunan daerah," tegasnya.

Tarmizi juga mengingatkan bahwa kontestasi Pilkada masih cukup jauh, diperkirakan baru berlangsung pada 2031. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melupakan perbedaan politik pada masa lalu dan membangun semangat kebersamaan demi kemajuan Aceh Barat.

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh elemen, terutama para pemangku kepentingan yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Tol Sibanceh Padang Tiji–Seulimeum Mulai Berbayar Awal 2027

Oleh Van · 20 Nov, 11.50 WIB



Gerbang Tol Padang Tiji siap melayani pengguna jalan dengan fasilitas modern.

BANDA ACEH – Masyarakat Aceh yang selama ini menikmati akses gratis di Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) Seksi I Padang Tiji–Seulimeum harus bersiap menghadapi perubahan kebijakan. PT Hutama Karya (Persero) menargetkan ruas tol tersebut mulai dikenakan tarif pada awal 2027, setelah seluruh pekerjaan penyempurnaan dituntaskan.

Target pemberlakuan tarif itu disampaikan Junior Project Director Tol Sigli–Banda Aceh, Vinjay Endika Saputro, dalam kegiatan media gathering bersama wartawan di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Hingga saat ini, jalur Padang Tiji–Seulimeum masih beroperasi secara fungsional dan dapat dilalui kendaraan masyarakat tanpa biaya selama 24 jam.

Hutama Karya menargetkan pekerjaan penyempurnaan ruas tersebut selesai pada Desember 2026. Jika target itu tercapai, awal 2027 menjadi momentum perubahan status layanan dari jalan tol fungsional gratis menjadi jalan tol yang dikenakan tarif.

Vinjay menyebutkan, target pengenaan tarif tidak hanya berlaku pada Seksi I Padang Tiji–Seulimeum, tetapi direncanakan mencakup seluruh ruas Tol Sibanceh, mulai Seksi I hingga Seksi VI.

“Di tahun depan kita sudah bertarif secara menyeluruh, baik Seksi I, II, III maupun sampai Seksi VI. Diharapkan awal tahun 2027,” ujarnya.

Pekerjaan Belum Sepenuhnya Rampung

Meski jalan utama atau main road telah selesai dibangun 100 persen, pekerjaan penyempurnaan Tol Sibanceh Seksi I masih menyisakan sejumlah tahapan. Hingga November 2026, progres keseluruhan proyek tercatat mencapai 96 persen.

Artinya, masih ada sekitar empat persen pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum ruas tersebut memasuki tahap operasional penuh dengan pemberlakuan tarif.

Vinjay juga memaparkan bahwa progres pengadaan tanah telah mencapai 95,91 persen. Sementara itu, sejumlah pekerjaan teknis masih harus dituntaskan, termasuk penyempurnaan lereng tegak, relokasi sungai, serta pembangunan jalan oprit pada bangunan struktur.

Pekerjaan tersebut menjadi bagian penting dari penyelesaian proyek agar infrastruktur, akses, dan konstruksi pendukung dapat berfungsi sesuai standar sebelum tarif diberlakukan.

Hutama Karya berharap seluruh pekerjaan yang tersisa dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026. Dengan demikian, masyarakat diproyeksikan mulai membayar ketika menggunakan Tol Sibanceh pada awal tahun berikutnya.

Keselamatan Pengguna Jalan Menjadi Sorotan

Selain persoalan penyelesaian konstruksi dan pemberlakuan tarif, aspek keselamatan pengguna jalan turut menjadi perhatian dalam pengelolaan Tol Sibanceh.

Regional Head Sumatera Bagian Utara Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol, Taufiq Hidayat, menjelaskan bahwa Tol Sibanceh termasuk kategori jalan …

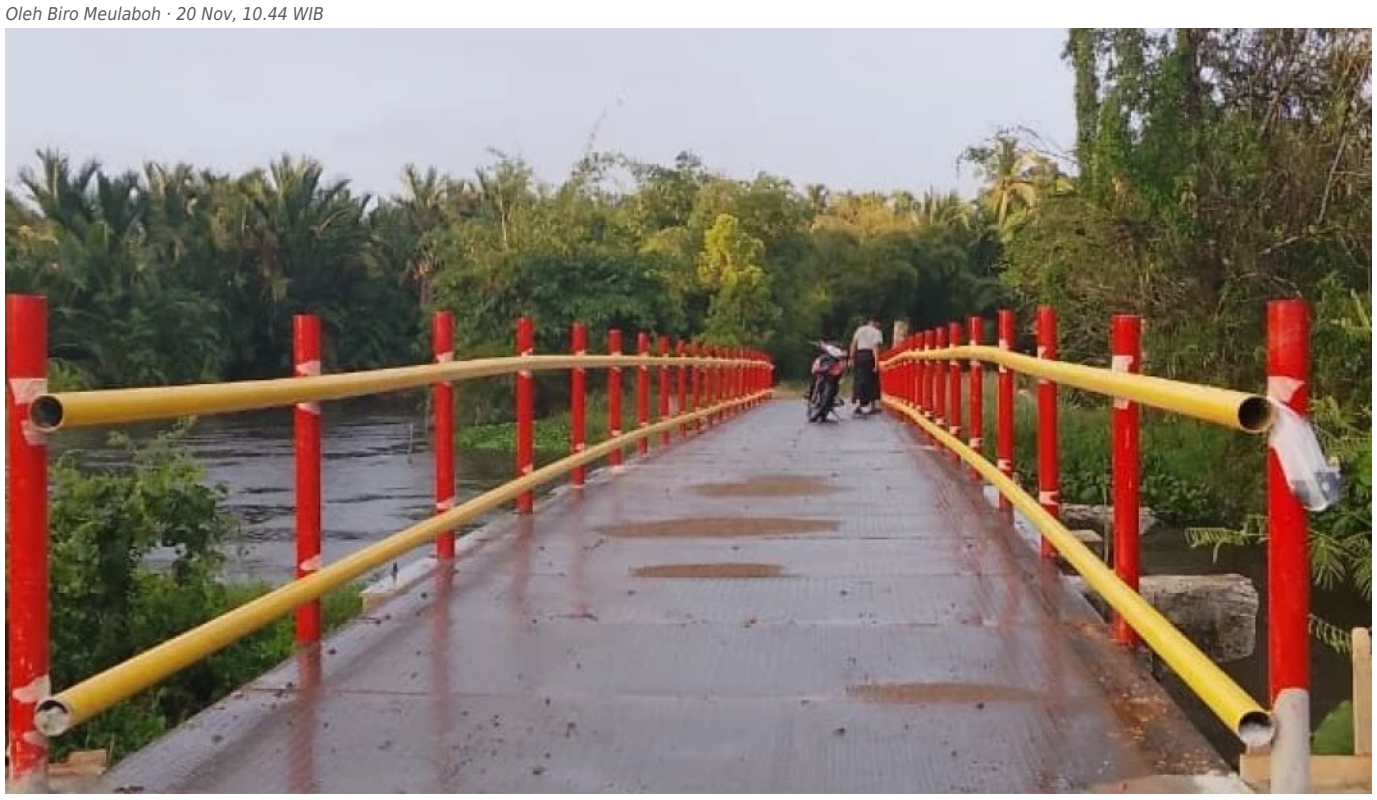
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Warga Apresiasi Bupati Tarmizi atas Pembangunan Jembatan Alue Sundak–Drien Rampak

Oleh Biro Meulaboh · 20 Nov, 10.44 WIB



Jembatan penghubung Desa Alue Sundak–Drien Rampak, Aceh Barat, yang dibangun melalui anggaran APBK sebesar Rp279 juta,FOTO/HAI

MEULABOH – Pembangunan jembatan penghubung antara Desa Alue Sundak dan Desa Drien Rampak, Kabupaten Aceh Barat, disambut penuh syukur dan apresiasi oleh masyarakat setempat. Infrastruktur yang telah lama dinantikan tersebut kini akhirnya terwujud melalui anggaran daerah (APBK) Aceh Barat sebesar Rp279 juta.

Apresiasi tersebut disampaikan tokoh masyarakat setempat, Zulmufnazar, S.Pd.I. Ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP.MM, beserta seluruh pihak terkait yang telah merealisasikan pembangunan jembatan tersebut.

Menurut Zulmufnazar, keberadaan jembatan ini memiliki arti penting bagi masyarakat, mengingat akses tersebut telah menjadi kebutuhan utama warga selama bertahun-tahun.

Ia menjelaskan, sejarah pembangunan jembatan tersebut bermula pada 2005 melalui program Pengembangan Kecamatan (PPK). Saat itu, jembatan dibangun dengan panjang kurang lebih 30 meter sebagai akses penghubung antardesa.

Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi jembatan mengalami kerusakan. Pada 2015, jembatan tersebut sempat direhabilitasi menggunakan dana APBK dengan konstruksi lantai kayu. Sayangnya, setelah digunakan beberapa tahun, kondisi jembatan kembali mengalami kerusakan.

"Jembatan ini sudah beberapa kali menjadi usulan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Namun, pembangunan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi," ungkap Zulmufnazar.

Ia menambahkan, harapan masyarakat mulai menemukan titik terang ketika Tarmizi mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Barat. Saat itu, Tarmizi berkomitmen untuk membangun kembali jembatan tersebut apabila mendapat amanah memimpin daerah.

"Alhamdulillah, komitmen tersebut kini telah terwujud. Kami sangat bersyukur karena jembatan yang selama ini kami harapkan akhirnya dibangun," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulmufnazar menyebutkan bahwa jembatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Desa Alue Sundak dan Drien Rampak, tetapi juga bagi warga sejumlah desa lainnya, seperti Alue Bagok, Alue Batee, Panton Bahagia, Cot Jurumudi, dan desa-desa sekitarnya.

Dengan kembali berfungsinya akses penghubung tersebut, masyarakat dapat memangkas jarak tempuh sekitar 5–6 kilometer menuju pusat kecamatan. Hal ini tentunya akan mempermudah mobilitas warga, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun berbagai keperluan sosial lainnya.

"Jembatan ini sangat kami butuhkan dan manfaatnya sangat besar bagi masyarakat beberapa desa. Selain mempermudah akses transportasi, keberadaannya juga memangkas jarak tempuh masyarakat menuju pusat kecamatan," jelasnya.

Atas terealisasinya pembangunan tersebut, Zulmufnazar kembali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP.MM, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan jembatan penghubung tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

3 BERITA

OPINI

Sinyal Pempek Calon Wapres: Membaca Peluang Hatta Rajasa Dipilih Prabowo

Oleh Redaksi · 20 Nov, 17.13 WIB



Oleh: Hamdi Mustapa

INAMIKA Politik nasional memasuki babak baru menyusul kekosongan kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri.

Di tengah bursa nama yang bermunculan, sebuah pernyataan ringan dari Kepala Badan Komunikasi (Bakom), Syahganda Nainggolan, memantik spekulasi luas di ruang publik. Dalam keterangannya, Syahganda memberikan kisi-kisi bahwa sosok kandidat pengganti Gibran adalah tokoh yang gemar menyantap pempek.

Jika isyarat kuliner khas Palembang tersebut dibaca melalui kacamata geopolitik domestik, arahnya merujuk kuat pada figur yang memiliki akar kultural dan historis dengan Sumatera Selatan.

Di antara sejumlah tokoh yang beredar, nama politisi senior asal Palembang, Hatta Rajasa, muncul sebagai salah satu kandidat yang memiliki irisan paling relevan dengan kode tersebut, sekaligus menawarkan kalkulasi politik yang strategis bagi Presiden Prabowo Subianto.

Efek Ganda: Mengunci PAN dan Demokrat Sekaligus

Dalam sejumlah ulasan pengamat dan opini publik—seperti yang dipaparkan oleh Hendrik Jauhari Oratmangun di Kabartimurnews maupun R. Haidar Alwi di Fakta Nasional—pencalonan Hatta Rajasa dinilai memiliki landasan politik yang konkret bagi stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Dari sisi kalkulasi koalisi, memilih Hatta Rajasa berpotensi memberikan efek elektoral dan konsolidasi ganda bagi Prabowo.

Pertama, sebagai tokoh sentral dan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), kehadiran Hatta secara otomatis mengukuhkan soliditas PAN yang selama ini konsisten berada di barisan pendukung Prabowo.

Kedua, posisi Hatta sebagai besan dari Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan jembatan komunikasi dan ikatan emosional yang kuat dengan Partai Demokrat.

Dengan satu langkah penunjukan, dua kekuatan politik utama di dalam koalisi dapat terikat dalam satu simpul kepentingan yang harmonis.

Selain faktor irisan dua partai tersebut, Prabowo dan Hatta bukanlah sosok asing satu sama lain.

Keduanya pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2014.

Pengalaman berjuang bersama di panggung politik nasional serta rekam jejak Hatta sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi modal kecocokan kerja yang tidak perlu lagi dibangun dari nol.

Tafsir Lain di Balik Kode "Pempek"

Meski nama Hatta Rajasa sangat lekat dengan identitas Sumatera Selatan dan kalkulasi PAN-Demokrat, isyarat "suka makan pempek" yang dilontarkan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan juga memicu penafsiran lain dari lingkaran internal …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Oleh Redaksi · 20 Nov, 08.48 WIB



0leh:Rosadi Jamani

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) ini partai Politik atau kelompok senam pagi yang takut berkeringat? Anggotanya membeludak, servernya tumbang, kadernya mulai menyenggol Presiden Prabowo Subianto, tetapi nyalinya masih seperti cicak mendengar suara sandal jepit.

Mau melawan takut, mau mendukung malu. Akhirnya berdiri di tengah jalan seperti gajah kebingungan melihat lampu lalu lintas.

Lihat saja Dedy Nur Palakka. Politikus PSI ini berani melontarkan kalimat, "Jangan dibantu lagi." Ia menyindir Prabowo Subianto yang konon sampai lima kali meminta restu Joko Widodo alias Jokowi agar putera sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon Wapres.

Lima kali, Bro! Kalau meminta restu sebanyak itu dilakukan untuk meminjam uang tetangga, mungkin tetangganya sudah pindah rumah sambil membawa pagar. Ini urusan politik nasional, bukan meminta izin meminjam blender.

Tetapi begitu sindiran itu beredar, PSI seperti baru mendengar petir menyambar tiang listrik markasnya. Mendadak semua bicara hati-hati. Jangan sampai Prabowo tersinggung. Jangan sampai dianggap menyerang pemerintah. Jangan sampai ada salah paham.

Aduh, Gusti! Ini partai politik atau kelompok arisan takut ketua RT marah?

Padahal, sekarang tidak ada satu pun kader PSI duduk sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. Nol! Kosong melompong! Tidak ada kursi menteri harus dijaga, tidak ada jas kabinet perlu disetrika, tidak ada jatah kekuasaan harus diamankan.

Mestinya inilah momentum paling tepat untuk bersikap tegas. Kalau memang tidak sejalan, deklarasi oposisi saja. Tidak perlu menunggu wahyu turun dari langit sambil membawa surat keputusan.

Yang lebih lucu, justru ketika PSI sedang kebanjiran anggota baru. Server pendaftaran ambruk karena 8.000 orang mendaftar pada hari Gibran lengser, 11.000 orang keesokan harinya, dan 11.000 lagi pada hari berikutnya. Total sekitar 30.000 orang dalam tiga hari!

Grace Anastasia sempat menyebut sudah ada 12 ribu pendaftar. Server PSI mungkin mengira sedang diserbu satu provinsi hendak mengambil BLT. Prosesornya kepanasan, kipas komputer berputar seperti baling-baling helikopter, kabel LAN mungkin sudah membaca istigfar.

Orang-orang berbondong-bondong masuk PSI, memamerkan KTA di media sosial. Seolah-olah baru mendapatkan paspor menuju Republik Perlawanan. Ironisnya, orang-orang datang membawa semangat perlawanan, sementara partainya sendiri masih takut-takut mengangkat alis kepada kekuasaan.

Ahmad Ali sebelumnya pernah menyebut Gibran berpotensi menjadi kompetitor kuat. Mungkin lawan Prabowo pada Pilpres 2029.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Hei Koruptor Bertobatlah atau Semua Hartamu Ludes Disita Negara

Oleh Redaksi · 20 Nov, 08.59 WIB



0leh:Rosadi Jamani

AKHIRNYA UU yang ditunggu disahkan. UU Perampasan Aset. Inilah senjata terakhir memberantas korupsi di negeri ini. Kalau masih juga marak, berarti korupsi benar-benar menjadi budaya kita.

DPR khirnya mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Setelah menunggu sejak 2008, selama 18 tahun, akhirnya negara punya senjata hukum untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan.

Delapan belas tahun, wak! Anak yang lahir ketika RUU ini mulai diperjuangkan sekarang sudah bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Sementara RUU-nya baru selesai menjalani masa pertumbuhan. Mungkin selama ini ia dititipkan di penitipan anak legislasi, lupa dijemput.

Tetapi ada kejadian yang membuat sejarah legislasi kita seperti film komedi. Pada 27 Agustus 2026, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Supriyono alias Botok, mendatangi Gedung DPR. Mereka menuntut RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian menyampaikan komitmen, paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan, ada dokumen tertulis. Jika gagal, pimpinan DPR menyatakan bersedia meletakkan jabatan pimpinan dan keanggotaan DPR.

Eh, 19 November sudah disahkan dalam rapat paripurna! Belum sampai Desember. Rupanya DPR bisa sprint juga. Selama ini rakyat mungkin mengira gedung parlemen hanya punya lift, ternyata ada tombol turbo.

Dalam pembahasannya, Panja menggarap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Terdiri dari 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Delapan fraksi di Komisi III menyetujui RUU dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II bersama pemerintah.

Sekarang bayangkan suasana di sebuah rumah mewah milik koruptor.

Istri bertanya, "Pa, mobil kita aman?"

Suami menjawab, "Aman, Ma. Selama belum ada pemeriksaan."

"Kalau vila?"

"Jangan dibicarakan. Nanti vila ikut mendengar."

"Kalau deposito?"

"Matikan Wi-Fi! Jangan sampai rekening kita punya mulut!"

Di tempat lain, setan sedang mengadakan rapat darurat. Kepala neraka membanting meja. "Bagaimana ini? Kalau harta hasil korupsi dirampas negara, penghuni baru kehilangan modal untuk menyewa kamar VIP di sini!"

Setan bagian keuangan langsung pingsan. Kalkulator neraka terbakar menghitung potensi kerugian. Bahkan iblis senior mengusulkan agar koruptor cukup dikirim ke ruang tunggu, jangan langsung masuk. Mereka takut neraka berubah menjadi kantor cabang BPK.

Tentu, perampasan aset bukan berarti negara boleh mengambil harta siapa saja sesuka hati.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

12 BERITA

TEKNOLOGI

Sebelum Kamera Turun ke Pasar: Merancang Video Liputan dengan Seedance 3.0

Oleh Redaksi · 20 Nov, 18.53 WIB



Dalam video singkat tentang sebuah pasar pagi, saya ingin menahan gambar pada tangan yang mengangkat pintu kios. Pintu belum terbuka penuh, tetapi dari luar sudah terdengar roda troli melintas. Beberapa detik kemudian, cahaya masuk dan penonton baru melihat apa yang ada di baliknya. Saya membayangkan liputan ini sebagai pengantar satu menit untuk cerita tentang bagaimana sebuah pasar mulai bekerja sebelum pembeli datang. Adegan itu memperkenalkan ritme tempatnya. Orang dapat melihat apa yang sedang dilakukan pedagang tanpa harus mendengar daftar barang yang dijual.

Sebelum datang membawa kamera, saya meminta izin untuk mengambil satu foto lorong, satu rekaman pendek saat pintu kios dibuka, dan suara roda yang melintas di lantai. Bahan itu dipakai untuk perencanaan. Foto memberi saya ukuran lorong, klip menentukan arah gerakan pintu, dan suara membantu menentukan berapa lama penonton bisa menunggu sebelum melihat sumber bunyi. Saya tidak akan memakai video buatan sebagai rekaman sebuah peristiwa. Untuk liputan, pratinjau berguna agar kru tahu gambar apa yang dibutuhkan ketika toko sungguhan membuka pintu.

Menjaga Bukaan Kios Tetap Terlihat

Dalam rancangan awal, saya menempatkan kamera sedikit menyamping, menghadap dinding kiri kios. Dengan begitu, badan orang yang membuka pintu tidak menutup seluruh bukaan. Saya ingin posisi tangan terlihat sampai pintu melewati tinggi pinggang, baru kemudian pandangan beralih ke barang yang masih ditutup kain. Percobaan di seedance 3.0 bisa menggabungkan foto lorong dengan potongan video pintu dan rekaman roda. Saya menjelaskan bahwa pintu terangkat ke atas dan bahwa posisi kamera tidak ikut berubah. Cahaya dari luar cukup mengenai lantai, supaya gerakan tangan tetap menjadi pusat adegan.

Jika draf pertama menunjukkan cahaya yang memutih di seluruh gambar, saya akan mengubah arah kamera. Menggeser kamera sedikit menuju lorong menjaga sisi dalam kios lebih gelap, tetapi memungkinkan garis cahaya tetap terlihat di lantai. Jika lorong sesak pada jam pengambilan gambar, saya menyiapkan versi yang lebih rapat dan merekam lantai secara terpisah. Dengan tiap versi, saya melihat apakah cahaya menjadi petunjuk yang cukup kuat untuk mengajak mata masuk tanpa menghalangi orang yang sedang mulai bekerja.

Troli Menjadi Penghubung Antaradegan

Saya menempatkan satu gambar roda yang melewati sambungan lantai setelah pintu terbuka. Kamera sekarang rendah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Putusan Bersejarah: ICJ Nyatakan Myanmar Terbukti Lakukan Genosida terhadap Rohingya

Oleh Redaksi · 20 Nov, 11.07 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menyatakan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Putusan ini dibacakan pada Kamis (19/11) itu memerintahkan Myanmar memberikan jalan aman bagi para pengungsi untuk kembali ke tempat tinggal mereka serta memberikan kompensasi kepada para korban.Putusan ini adalah pertama kali dalam 80 tahun sejarah ICJ, hakim-hakim pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa suatu negara telah melakukan genosida. Keputusan ini dipandang sebagai bentuk keadilan bagi para korban Rohingya atas operasi militer Myanmar pada 2017 terhadap kelompok minoritas yang sebagian besar beragama Islam tersebut.

"Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara," kata Presiden ICJ Yuji Iwasawa saat membacakan putusan di Aula Utama Kehakiman, Den Haag, Belanda, dilansir AFP.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Myanmar mengizinkan warga Rohingya yang berada di pengasingan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Sementara itu, Presiden Gambia Adama Barrow, yang negaranya mengajukan perkara tersebut pada 2019, menyebut putusan itu sebagai "hari bersejarah bagi keadilan internasional".

Di Bangladesh, ratusan orang mengikuti jalannya persidangan melalui layar raksasa di Cox's Bazar, kamp pengungsi terbesar di dunia yang menampung lebih dari satu juta orang. Banyak di antara mereka menangis ketika Iwasawa membacakan putusan tersebut.

Mohammed Osman, yang kedua orang tuanya dan empat saudara kandungnya dibunuh oleh militer Myanmar, mengatakan putusan itu membuktikan bahwa genosida yang mereka alami bukan omong kosong.

"Saya sangat terharu ... Namun, kami baru mencapai 50 persen dari apa yang kami inginkan. Kami akan mencapai 100 persen ketika kami dipulangkan dengan bermartabat," kata Osman, 20 tahun, kepada AFP.

Selama hampir tiga jam, Iwasawa memaparkan bukti-bukti mengerikan mengenai kekejaman Myanmar terhadap warga Rohingya selama operasi militer tersebut. Operasi itu memaksa ratusan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya.

"Mereka melakukan kekerasan seksual secara meluas, terhadap perempuan, serta melakukan "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak, kata Iwasawa.

ICJ menyatakan bukti-bukti yang ada mengarah pada sekitar 10 ribu orang yang tewas dalam apa yang disebut Myanmar sebagai 'operasi pembersihan' untuk menekan komunitas Rohingya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Wisata Jogja Bareng Rombongan? Ada Promo Sewa Bus Mulai Rp1 Jutaan

Oleh Redaksi · 20 Nov, 22.37 WIB



Perjalanan wisata ke Yogyakarta terus menunjukkan aktivitas yang tinggi. Kementerian Pariwisata mencatat sebanyak 3.890.520 perjalanan wisatawan nusantara menuju Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Agustus 2026. Jumlah tersebut meningkat 29,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah tingginya mobilitas wisatawan, kebutuhan transportasi yang nyaman menjadi salah satu hal penting, terutama bagi mereka yang datang bersama keluarga, komunitas, maupun rombongan perusahaan.

Bagi wisatawan yang menempuh perjalanan jauh, urusan transportasi bukan sekadar menentukan kendaraan yang bisa mengangkut banyak orang. Kondisi tempat duduk, fasilitas selama perjalanan, ketepatan penjemputan, hingga kemampuan pengemudi memahami rute turut memengaruhi pengalaman liburan. Hal inilah yang perlu diperhatikan sebelum menyusun agenda wisata Jogja bersama rombongan. Happy Trans menawarkan pilihan armada pariwisata dengan kapasitas beragam, mulai dari Medium Bus hingga Big Bus. Dengan penawaran harga mulai Rp1 jutaan untuk penggunaan dalam kota, layanan ini dapat menjadi pilihan bagi kelompok yang ingin menikmati perjalanan bersama tanpa harus mengatur banyak kendaraan secara terpisah.

Perjalanan Jauh Membutuhkan Kendaraan yang Nyaman

Perjalanan menuju Yogyakarta dari luar kota bisa memakan waktu berjam-jam. Setelah melewati perjalanan panjang, wisatawan tentu ingin tetap memiliki tenaga untuk mengunjungi destinasi yang sudah direncanakan. Karena itu, fasilitas kendaraan sebaiknya menjadi pertimbangan sejak awal. Happy Trans menyediakan Medium Bus dan Big Bus dengan fasilitas Full AC, Full Music, reclining seats, TV LCD, karaoke, serta USB charger. Fasilitas tersebut mendukung kenyamanan penumpang selama perjalanan, baik ketika berangkat dari kota asal maupun saat berpindah dari satu tempat wisata ke destinasi lainnya.

Beberapa fasilitas tambahan seperti bantal dan selimut bersifat opsional, sedangkan toilet dan smoking room hanya tersedia pada unit tertentu. Calon pelanggan dapat memastikan spesifikasi kendaraan terlebih dahulu agar armada yang dipilih sesuai dengan kebutuhan perjalanan.

Selain fasilitas, pelayanan pengemudi juga menjadi perhatian. Driver Happy Trans dikenal melalui pelayanan yang ramah dan profesional serta pemahaman terhadap rute perjalanan. Bagi rombongan dari luar daerah, pengemudi yang memahami jalur menuju berbagai kawasan di Yogyakarta dapat membantu perjalanan berlangsung lebih terarah.

Harga Mulai Rp1 Jutaan, Pilihan Kapasitas untuk Berbagai Rombongan

Jumlah peserta menjadi salah satu faktor yang menentukan biaya dan jenis kendaraan. Rombongan keluarga dengan belasan orang tentu memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan study tour atau gathering …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Legenda Tottenham dan Harapan Inggris: Mengenang Jimmy Greaves

Oleh Redaksi · 20 Nov, 20.00 WIB



Mengenang Jimmy Greaves, sang pencetak gol legendaris bagi Tottenham Hotspur dan tim nasional Inggris. FOTO/Andrey for HAI.

BANDA ACEH - Sebagian penggemar mengenang Jimmy Greaves berkat gol-golnya bersama Tottenham dan tim nasional Inggris, sementara yang lain mengenangnya karena lelucon-lelucon jenakanya serta senyumnya yang tak pernah pudar di layar kaca.

1xBet Indonesia menengok kembali salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris, yang rekor dan prestasinya masih menjadi tolok ukur bagi para pemain muda.

Bakat yang ditemukan saat berusia 17 tahun

Jimmy Greaves mulai membuat dunia sepak bola Inggris terkesan pada usia 17 tahun, saat ia mencetak gol dalam debutnya bersama Chelsea.

Menariknya, Tottenham Hotspur adalah tim pertama yang merasakan dampak dari bakatnya, meskipun justru di Spurs-lah Jimmy menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam kariernya.

Hanya tiga tahun kemudian, striker ini mencetak gol ke-100-nya di liga utama Inggris, dan pada usia 20 tahun, ia menjadi pemain termuda yang mencapai angka tersebut. Rekor Greaves tetap tak terpecahkan hingga hari ini.

Pada musim panas 1961, Greaves pindah ke Milan. Meskipun penampilannya dalam mencetak gol sangat mengesankan, Jimmy tak pernah benar-benar betah di Italia dan kembali ke London pada bulan Desember, lalu bergabung dengan Tottenham.

Sebuah biaya transfer yang memecahkan rekor, namun tidak biasa, sebesar £99.999 dibayarkan untuk sang penyerang.

Selisih satu pound tersebut biasanya dikaitkan dengan keinginan manajer legendaris Spurs, Bill Nicholson, untuk membebaskan pemain baru tersebut dari tekanan tambahan yang akan ditimbulkan oleh status sebagai "pemain seharga £100.000".

Sembilan tahun pencapaian dan kemenangan

Dalam pertandingan pertamanya bersama Tottenham, Greaves mencetak hat-trick, dan pada musim semi 1962, ia menjuarai Piala FA—gelar pertamanya bersama klub barunya.

Kemenangan yang lebih gemilang terjadi pada 1963, ketika Spurs menghancurkan Atlético Madrid 5-1 di final Piala Pemenang Piala.

Jimmy mencetak dua gol dan membantu Tottenham menjadi klub Inggris pertama yang memenangkan trofi Eropa.

Selama sembilan tahun berkarier di Tottenham Hotspur, Jimmy Greaves mencetak 266 gol dalam 379 pertandingan dan mencatatkan rekor klub yang bertahan selama lebih dari setengah abad.

Baru pada Februari 2023, Harry Kane berhasil melampaui pencapaian ini, dengan akhirnya mencetak 280 gol untuk klub asal London Utara tersebut.

Juara dunia yang gagal lolos ke final

Pada Piala Dunia 1966 yang digelar di tanah airnya sendiri, Greaves dianggap sebagai salah satu harapan utama Inggris.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Orangutan Harie yang Kurus Diduga Terdampak Karhutla Kini Dilepasliarkan

Oleh Van · 20 Nov, 19.12 WIB



Momen tenang seekor orangutan jantan selama proses relokasi untuk upaya konservasi.

KALIMANATAN TENGAH — Orangutan bernama Harie kembali ke habitat alaminya di Suaka Margasatwa Lamandau, Kalimantan Tengah, pada Rabu, 18 November 2026. Satwa berusia sekitar 30 tahun itu dilepasliarkan setelah hasil pemeriksaan darah menyatakan kondisinya sehat.

Sebelumnya, Harie ditemukan dalam kondisi kurus di sekitar kebun sawit warga di Desa Bagendang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur. BKSDA menduga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyebabkan berkurangnya sumber pakan alami sehingga Harie mendekati kawasan perkebunan.

Komandan BKSDA Pos Sampit, Muriansyah, mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan menjadi dasar keputusan pelepasliaran Harie.

"Setelah hasil pemeriksaan darah keluar dan dinyatakan sehat, Rabu pagi suratnya keluar, sorenya langsung diperintahkan pimpinan untuk lepasliar di Suaka Margasatwa Lamandau," kata Muriansyah.

Harie Dilepasliarkan Setelah Dinyatakan Sehat

Muriansyah menjelaskan satwa liar hasil penyelamatan sebaiknya tidak terlalu lama berada di kandang apabila kondisinya sudah memungkinkan untuk kembali ke alam.

"Kalau satwa liar hasil rescue, memang sebaiknya segera dilepasliarkan. Jangan lama di kandangkan. Biar sifat-sifat dan insting liarnya tetap ada," ujarnya.

Namun, satwa yang terdeteksi memiliki penyakit harus menjalani pengobatan terlebih dahulu sebelum dilepasliarkan.

"Kecuali jika ditemukan penyakit dari hasil pengecekan darah tadi, mau tidak mau diobati dulu baru bisa dilepasliarkan," jelas Muriansyah.

Pelepasliaran Harie dilakukan oleh Tim Rescue Seksi KSDA Wilayah I BKSDA Kalimantan Tengah bersama Orangutan Foundation International (OFI) di Suaka Margasatwa Lamandau.

Dalam dokumentasi pelepasliaran, Harie terlihat langsung memanjat pohon dan memakan pucuk daun muda setelah pintu kandangnya dibuka.

Sempat Masuk Kebun Sawit Warga

Harie sebelumnya diselamatkan pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Penyelamatan dilakukan di Gang Nur Dahlia, Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, setelah warga melaporkan keberadaan orangutan tersebut kepada BKSDA Pos Sampit.

Orangutan jantan itu diketahui telah beberapa kali terlihat berpindah-pindah di sekitar lokasi untuk mencari makan. Kehadirannya mulai berdampak pada kebun masyarakat karena satwa tersebut memakan pucuk muda kelapa sawit.

Saat dievakuasi, Harie memiliki berat badan 63,5 kilogram dengan perkiraan usia sekitar 30 tahun. Kondisi fisiknya terlihat kurus, tetapi petugas tidak menemukan luka bakar maupun luka serius.

BKSDA menduga kebakaran hutan dan semak belukar pada September hingga Oktober 2026 membuat sumber pakan alami Harie berkurang. Kondisi tersebut diduga mendorongnya mendekati perkebunan dan kawasan aktivitas warga.(*)

BISNIS

DKP Kabupaten Aceh Utara Awasi Pengolahan Ikan Teri di Dewantara, Pasar Tembus Sumatera Utara

Oleh Hamdani · 20 Nov, 21.14 WIB



Tim PSDKP DKP Kabupaten Aceh Utara melakukan monitoring proses pengolahan ikan teri rebus milik pelaku usaha di Gampong Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Jumat

ACEH UTARA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Utara memantau proses pengolahan ikan teri rebus milik pelaku usaha di Gampong Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Jumat (20/11/2026). Pengawasan dilakukan untuk memastikan produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu, kebersihan, dan keamanan pangan.

Monitoring dan evaluasi tersebut dipimpin langsung Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DKP Aceh Utara, Teuku Johan Maulana, bersama tim. Pemeriksaan mencakup seluruh tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku, perebusan, pengeringan hingga pengepakan.

Teuku Johan Maulana mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan proses pengolahan yang baik sehingga kualitas produk tetap terjaga.

“Mutu dan kebersihan harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan pengolahan. Kami ingin memastikan produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, memiliki kualitas yang baik, dan mampu bersaing di pasar,” ujarnya.

Dari hasil pemantauan, produk ikan teri rebus yang dihasilkan pelaku usaha di Gampong Bangka Jaya memiliki jangkauan pemasaran cukup luas. Selain dipasarkan ke berbagai kabupaten dan kota di Aceh, produk tersebut juga telah menembus pasar Sumatera Utara.

Menurut Teuku Johan, perkembangan pemasaran tersebut menunjukkan bahwa usaha pengolahan hasil perikanan di tingkat gampong memiliki potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan.

“Usaha pengolahan ikan seperti ini memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas produk harus terus dipertahankan agar kepercayaan konsumen dan jangkauan pasarnya semakin meningkat,” katanya.

Usaha pengolahan ikan teri di Gampong Bangka Jaya menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Selain menghasilkan produk bernilai tambah, kegiatan tersebut turut mendukung distribusi hasil perikanan ke pasar antardaerah.

DKP Aceh Utara melalui Bidang PSDKP akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus memperkuat daya saing produk perikanan daerah.[]

OTOMOTIF

Hyundai Resmi Buka Pemesanan SUV Listrik Neira, Harga Mulai Rp388 Juta

Oleh Redaksi · 20 Nov, 19.06 WIB



BANDA ACEH -PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi membuka keran pemesanan atau pre-book untuk mobil listrik terbarunya, Hyundai Neira.

SUV listrik berkapasitas tujuh penumpang tersebut ditawarkan dengan harga mulai dari Rp388 juta untuk varian terendah, sebagaimana dilansir dari ANTARA News, Jumat (20/11/2026).

Kepastian peluncuran komersial ini diumumkan langsung dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD, Tangerang.

“Ini sudah bukan prototipe, ini adalah unit yang akan dijual ke konsumen secara langsung. Kita juga sudah menentukan harganya untuk harga khusus selama periode pre-booking,” ujar Chief Operating Officer (COO) PT HMID Fransiscus Soerjopranoto mengutip Antara.

Hyundai menghadirkan Neira dalam tiga pilihan varian, yakni Essential, Style, dan Prime. Jika varian terendahnya dipasarkan seharga Rp388 juta, varian tertinggi dari SUV listrik ini dilego Rp448 juta.

Penawaran harga khusus selama periode pre-booking tersebut berlaku terbatas bagi 1.000 konsumen pertama. Masyarakat sudah dapat melakukan pemesanan mulai Jumat (20/11/2026), sedangkan pengiriman unit awal kepada konsumen dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027.

Sebelum resmi dipasarkan, Hyundai Neira pertama kali diperkenalkan ke publik dalam wujud prototipe pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kini, model tersebut telah diproduksi secara lokal di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) yang berlokasi di Cikarang, Bekasi.

Tidak hanya perakitan kendaraan, baterai berbasis nikel pada Neira juga diproduksi di dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Fransiscus mengungkapkan bahwa capaian kandungan lokal pada Neira menjadi yang tertinggi saat ini.

“Secara local content-nya itu yang paling tinggi sekarang, TKDN 80 persen dan BMP 15 persen. Jadi total 95 persen. Pakai baterai berbasis nikel, pastinya itu sumber daya dari Indonesia, kita akan manfaatkan itu. Diproduksi di pabrikan baterai kita, Green Power yang ada di Karawang, kemudian baterai pack-nya akan dibawa ke pabrik yang ada di Cikarang,” kata Fransiscus.

Empat Fitur Unggulan Penunjang Mobilitas Keluarga

Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga di Tanah Air, Hyundai membekali Neira dengan empat fitur unggulan utama. Dari sisi ketangguhan berkendara, kendaraan berdesain SUV crossover ini memiliki ground clearance setinggi 200 milimeter yang dirancang guna mengakomodasi beragam kondisi jalan di Indonesia.

Pada aspek digital, Neira dilengkapi teknologi konektivitas Bluelink yang memungkinkan pengguna menghubungkan mobil dengan ponsel pintar untuk mengakses …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

Oleh Van · 20 Nov, 19.07 WIB



Pramono Anung memberikan keterangan kepada wartawan dalam sebuah acara alumni.

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut naik 7,1 persen atau Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Pramono pada Jumat, 20 November 2026.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat.

UMP Jakarta pada 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Dengan demikian, kenaikan tahun depan mencapai Rp 407.065 atau lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan tahun sebelumnya yang sebesar 6,1 persen.

Pembahasan UMP Jakarta Berlangsung Tiga Hari

Pramono menjelaskan penetapan UMP Jakarta 2027 dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Proses tersebut melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.

"Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," tuturnya.

Pramono mengatakan pembahasan tersebut berhasil dirampungkan lebih cepat dari tenggat penetapan yang jatuh pada Sabtu, 21 November 2026. Ia menyebut pemerintah daerah berupaya mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha.

"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.

Pramono Ingin Kesejahteraan Buruh dan Usaha Terjaga

Pramono menegaskan kebijakan kenaikan UMP tidak hanya mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja. Pemerintah daerah juga memperhatikan kemampuan pengusaha agar kegiatan usaha tetap berjalan.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," kata Pramono.

Ia menyebut Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai penghubung dalam pembahasan yang melibatkan unsur pekerja dan pengusaha. Perbedaan pandangan mengenai besaran kenaikan upah menjadi bagian dari proses yang dibahas bersama Dewan Pengupahan.

Dengan penetapan tersebut, UMP Jakarta 2027 naik menjadi Rp 6.136.941 per bulan. Besaran ini akan menjadi acuan upah minimum di wilayah DKI Jakarta pada tahun mendatang.(*)

EDUKASI

Studi Literasi di Perpustakaan Kecamatan Montasik Lahirkan Poster Digital Ajakan Membaca Karya Siswi SMP Negeri 3 Montasik

Oleh Syarifudin Brutu · 20 Nov, 16.36 WIB



Momen kebersamaan para siswi saat berkumpul di meja panjang dengan penuh semangat. Mari tingkatkan literasi dan kebersamaan di lingkungan sekolah.

ACEH BESAR — Perpustakaan Kecamatan Montasik kembali menunjukkan perannya sebagai ruang belajar aktif bagi generasi muda. Pada Jumat, 20 November 2026, sebanyak 10 siswi SMP Negeri 3 Montasik bersama satu guru pendamping mengikuti kegiatan Studi Literasi di perpustakaan kecamatan tersebut.

Kegiatan itu melahirkan inovasi berupa poster digital ajakan budaya literasi yang dirancang langsung oleh para peserta dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).

Kegiatan ini diikuti 11 peserta, terdiri dari 10 siswi dan 1 orang guru pendamping. Penyelenggaranya adalah pengelola Perpustakaan Kecamatan Montasik di bawah naungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Besar. Tujuannya mendorong siswi tingkat SMP agar tidak sekadar membaca, tetapi juga mampu menyerap isi bacaan, mengolahnya, dan menyampaikannya kembali melalui media kreatif yang dekat dengan kehidupan mereka.

Berbeda dari kegiatan literasi konvensional yang identik dengan membaca dalam diam, sesi kali ini dirancang interaktif dan berbasis karya. Para siswi memilih buku dari koleksi perpustakaan, memahami isinya, mendiskusikannya bersama, lalu menuangkan pesan yang mereka tangkap ke dalam poster digital yang mengajak teman sebaya gemar membaca. AI dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mewujudkan gagasan visual, sementara pesan dan gagasan intinya tetap lahir dari bacaan dan pemikiran para siswi sendiri.

Pendekatan ini dinilai tepat sasaran karena generasi muda tumbuh bersama teknologi digital. Alih-alih melawan arus, kegiatan ini menjadikan teknologi sebagai jembatan menuju budaya literasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Jamalidiana, selaku Pengelola Perpustakaan Kecamatan Montasik, menyampaikan harapannya dalam sesi pembukaan.

"Perpustakaan hari ini tidak boleh berhenti menjadi tempat menyimpan buku. Ia harus menjadi ruang tempat gagasan lahir, dibahas, dan disebarluaskan. Lewat poster digital ini, adik-adik SMP membuktikan bahwa membaca adalah titik awal untuk berkarya, bahkan untuk mengajak teman-temannya ikut membaca," ujar Jamalidiana.

Guru pendamping, Fathimah, S.Pd.I, yang mengikuti kegiatan tersebut, menilai sesi ini memberi pengalaman belajar yang berbeda.

"Biasanya anak-anak membaca karena tugas. Hari ini mereka membaca untuk memahami, kemudian mengolahnya menjadi pesan yang mengajak orang lain. AI membantu mereka mewujudkan gagasan, tetapi isi pesannya tetap berasal dari bacaan dan pemikiran mereka. Itu yang ingin kami jaga," kata Fathimah.

Pengalaman serupa disampaikan Hafiya Dina, siswi peserta kegiatan. Ia mengaku pandangannya tentang membaca berubah setelah ikut studi literasi ini.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Viral Guru SMP di Surabaya Cek Celana Dalam Siswi yang Ngaku Sedang Haid

Oleh Redaksi · 20 Nov, 17.40 WIB



BANDA ACEH - SMPN 21 Surabaya menjadi viral di media sosial setelah guru sekolah sampai mengecek celana dalam para siswi yang mengaku sedang haid saat jadwal salat.Siswi tersebut merasa tidak nyaman karena pemeriksaan dilakukan dengan mengangkat rok dan menurunkan celana dalam yang dianggap melanggar privasi.

Dikutip dari akun Instagram @ini_surabaya, laporan siswi itu mengungkapkan awalnya sekolah hanya memeriksa rok untuk memastikan apakah siswi mengenakan pembalut ketika mengaku sedang haid.

Namun, muncul aturan baru dari salah satu guru, yakni siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur karena alasan haid harus menjalani pemeriksaan celana dalam pada Jumat (30/10).

Persoalan ini kemudian diadukan siswa tersebut ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dalam pesan pengaduannya kepada Eri, siswi tersebut menyebut para murid sempat menolak aturan itu karena menganggap pemeriksaan bagian tubuh pribadi sebagai pelanggaran privasi.

"Awalnya kami para murid membantah itu termasuk dari bagian privasi kami, tetapi guru itu kukuh dengan pendiriannya," ungkap siswi tersebut.

Dia juga mengungkapkan guru tersebut menyatakan pemeriksaan hanya dilakukan dengan sedikit menurunkan celana dalam dan mengangkat rok.

"Kami tetap merasa itu melanggar privasi kami karena itu celana dalam, Pak," lanjut siswi itu.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri mengaku menerima laporan langsung dari siswi yang keberatan dengan prosedur pemeriksaan tersebut.

"Ini ada laporan dari siswi SMPN 21 Surabaya. Waktu dia menstruasi, dicek oleh gurunya, benar menstruasi atau tidak. Anaknya merasa nggak nyaman," kata Eri.

Cak Eri lalu meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya melakukan pengecekan langsung ke sekolah.

Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati kemudian meminta klarifikasi kepada Kepala SMPN 21 Surabaya Diaztiarni.

Berdasarkan penjelasan kepala sekolah, pemeriksaan menstruasi tersebut merupakan bagian dari prosedur pengecekan terhadap siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur.

Dispendik juga meminta keterangan dari guru yang bersangkutan hingga petugas Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Dari hasil klarifikasi awal, kebijakan tersebut diberlakukan karena banyak siswi tidak mengikuti salat dengan alasan sedang menstruasi.

Guru yang bersangkutan berdalih pemeriksaan dilakukan secara terbatas, yakni sedikit menurunkan celana dalam, di ruangan tertutup, oleh guru perempuan, dan hanya dilakukan saat inspeksi mendadak (sidak). (*)

OTOMOTIF

Toyota Rilis Land Cruiser FJ dan Rush Terbaru di GAW 2026, Intip Harganya

Oleh Redaksi · 20 Nov, 14.47 WIB



BANDA ACEH -- Toyota meluncurkan All New Land Cruiser FJ dan New Toyota Rush di Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, Jumat (20/11/2026). Kedua model tersebut hadir dengan pilihan varian dan harga berbeda untuk menyasar kebutuhan konsumen di segmen SUV.

Kehadiran mobil tersebut melengkapi portofolio lebih dari 30 model Toyota di Indonesia, yang mencakup kendaraan bermesin konvensional (ICE), kendaraan elektrifikasi Hybrid EV dan Battery EV, serta beragam segmen kendaraan, mulai dari keluarga, SUV tangguh, dan kendaraan performa tinggi dari Gazoo Racing (GR).

"Selama 55 tahun mendampingi masyarakat Indonesia, Toyota belajar setiap individu dan keluarga memiliki kebutuhan, gaya hidup, serta preferensi berkendara yang unik. Di GAW 2026, kami menghadirkan beragam pilihan kendaraan yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat, sekaligus berbagai kemudahan untuk memiliki dan merawat kendaraan," ujar President Director PT Toyota-Astra Motor, Takuya Yokohama.

All New Land Cruiser FJ

All New Land Cruiser FJ hadir dalam dua pilihan varian dengan karakter berbeda, yaitu Land Cruiser FJ dan Land Cruiser FJ Adventure. Varian Land Cruiser FJ menampilkan karakter modern melalui penggunaan skid plate berwarna gelap dan lampu utama berbentuk kotak (square headlamp).

Sementara itu, Land Cruiser FJ Adventure mengusung nuansa petualang klasik melalui lampu utama berbentuk bulat (circle headlamp), skid plate berwarna light gray, desain bumper khusus dengan sudut yang lebih tegas (corner shape), serta aksen perak pada rear bumper dan step garnish.

All New Land Cruiser FJ hadir di Indonesia dalam lima pilihan warna, yaitu Smoky Blue, Oxide Bronze MC, Platinum White Pearl MC, Ash, dan Attitude Black MC. Mobil ini dibanderol mulai Rp835 juta hingga Rp870 juta untuk harga on the road (OTR) Jakarta.

New Toyota Rush

New Toyota Rush tetap mempertahankan karakter Real SUV Identity melalui sistem penggerak roda belakang (Rear-Wheel Drive/RWD), sasis kokoh, dan ground clearance tinggi. Kombinasi tersebut mendukung keandalan kendaraan dalam menghadapi beragam kondisi jalan di Indonesia. Karakter sporty New Rush juga semakin diperkuat melalui varian GR Sport.

New Toyota Rush mendapatkan sejumlah pilihan varian dengan transmisi manual dan otomatis. SUV ini ditawarkan mulai Rp289,1 juta hingga Rp316,3 juta.

Selain di Jakarta, Toyota juga akan hadir di sembilan kota penyelenggaraan GAW 2026 lainnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Pemerintah Cabut Izin PBPH PT RAPP, Perusahaan Terafiliasi Grup RGE Milik Konglomerat Sukanto Tanoto

Oleh Redaksi · 20 Nov, 14.54 WIB



BANDA ACEH, RIAU – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. PT RAPP merupakan bagian dari kelompok usaha konglomerat Sukanto Tanoto yang terafiliasi dengan Grup Royal Golden Eagle (RGE), yang berkantor pusat di Singapura.

Keputusan pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah segera melaksanakan penertiban sebagai tindak lanjut atas keputusan tersebut untuk mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara.

Berdasarkan keterangan Satgas PKH, pencabutan izin ini didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, adanya perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare tanpa izin, bukaan tambang seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan pula pelanggaran terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak langsung terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

Dengan dicabutnya perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal kerja izin dihentikan dan kawasan seketika dikuasai kembali oleh negara. Perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku serta menanggung segala tanggung jawab hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Kegiatan penertiban ini berlangsung dengan dihadiri pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Kemenhut, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.

Jajaran pejabat lainnya yang turut hadir meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, serta unsur penerangan dari Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Secara bersamaan, Satgas PKH juga melaksanakan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin